



RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR RI
BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SERTA PERUM BULOG

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke-	:	12
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dengan	:	Dihadiri oleh Kepala Badan Restorasi Gambut, Dirut Perum Perhutani, dan Dirut PT Inhutani I-V.
Hari, Tanggal	:	Senin, 24 Juni 2019
Waktu	:	10.00 s.d. 15.20 WIB
Acara	:	1. Pembahasan RKA K/L Tahun 2020; 2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I; 3. Tindak Lanjut Ikhtisar Hapsem BPK Semester II Tahun 2018; dan 4. Isu-isu aktual bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Ketua Rapat	:	Viva Yoga Mauladi, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo (Kbag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	:	38 dari 47 Anggota
		1. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 2. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal); 3. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) 4. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan); 5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumbar Daya Alam dan Ekosistem); 6. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 7. Drs. M. R. Karliansyah, M.S (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan); 8. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya);
Hadir Mitra Kerja	:	

9. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung);
10. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);
11. Ir. Laksmi Wijayanti, M.C.P. (Plt. Inspektur Jenderal)
12. Ir. Hartono Prawiraatmadja, M.Sc. (Sekreraris Badan Restorasi Gambut)); dan
13. Denaldy M. Mauna (Direktur Utama Perum Perhutani) beserta jajaran.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

1. Dr. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.
2. VIVA YOGA MAULADI, M.Si.
3. DANIEL JOHAN
4. SUDIN
5. Ir. MINDO SIANIPAR
6. ONO SURONO, S.T.
7. Ir. EFFENDI SINAIPAR
8. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.
9. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.
10. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA
11. H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.
12. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.
13. Ir. EDDY KUNTADI
14. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.
15. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
16. dr. FELICITAS TALLULEMBANG
17. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P.
18. EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.
19. M. IRWAN ZULFIKAR, M.B.A.
20. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.
21. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.
22. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
23. Hj. KASRIAH
24. H. ASEP AHMAD MOUSHUL AFFANDY
25. Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.
26. SULAEMAN L. HAMZAH

ANGGOTA YANG IJIN:

1. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.
2. Drs. H. ROEM KONO
3. Drs. I MADE URIP, M.Si.
4. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.
5. RIDWAN ANDI WITTIRI
6. Ir. TAGORE ABUBAKAR
7. DJENDRI ALTING KENTJEM, S.H., M.H.
8. ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.

9. H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.
10. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
11. SUSI SYAHDONNA MARLENY BACHSIN, S.E., M.M.
12. Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.
13. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos.
14. EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.
15. Drs. H. IBNU MULTAZAM
16. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.
17. Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si.
18. Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.
19. Drs. FADHOLI
20. Drs. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si.
21. Dr. ERISLAN, S.T., M.M.

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00)

KETUA RAPAT (VIVA YOGA MAULADI, M.Si.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang.

Salam Sejahtera Buat Kita Semuanya.

Shalom.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Yang Terhormat Saudari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Beserta Jajarannya.

Yang Terhormat Saudara Kepala Badan Restorasi Gambut Beserta Jajarannya Yang Diwakili oleh Sekretaris, Pak Hartono.

Yang Terhormat Saudara Direktur Utama Perum Perhutani.

Dan PT Inhutani I, II, III, IV, V.

Serta Hadirin Yang Kami Hormati.

Mengawali rapat pada pagi hari ini marilah sama-sama kita mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan

sehat *wal aflat*, untuk menjalankan salah satu tugas dan fungsi DPR RI yaitu fungsi anggaran.

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019, yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 20 Maret 2019 dan Keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 14 Mei 2019, serta menindaklanjuti surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor Angke 2019 tanggal 8 Mei 2019 mengenai Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah RKP Tahun 2020. Pada hari ini Senin 24 Juni 2019 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia membahas RKAKL dan RKPKL Tahun Anggaran 2020, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I, Tindak Lanjut Ikhtisar Hansen BBK Semester II Tahun 2018 dan isu-isu penting lainnya.

Sebelum dilanjutkan masih dalam suasana Bulan Syawal, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah, *Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Wa Taqabbal Ya Kariim*, Mohon Maaf Lahir Dan Batin. Apabila selama ini atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV ada hal-hal yang khilaf, kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa, tindakan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Karena kami beranggapan bahwa mitra Komisi IV KLHK adalah merupakan mitra kerja Komisi IV yang sangat baik hati dan selama ini selalu terus melakukan komunikasi dengan baik.

Bapak/Ibu Yang Kami Hormati.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI telah hadir 19 Anggota dari 47 Anggota Komisi IV, 8 Fraksi. Maka sesuai dengan Ketentuan 246 dan Pasal 251 Ayat 1 Peraturan Tatib DPR RI Rapat Kerja dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUK PALU SATU KALI)

Sesuai undangan rapat hari ini dimulai pukul 10.00 molor ini, menjadi pukul 11.00 dan diakhiri pada pukul 12.00. Nanti bisa diperpanjang apabila sesuai dengan kesepakatan. Adapun untuk agenda rapat pada hari ini adalah:

1. Pengantar Ketua Rapat.
2. Penjelasan Menteri KLHK mengenai RKAKL dan RKPKL Tahun Anggaran 2020 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I, Tindak Lanjut Ikhtisar HAPSEM BPK Semester II Tahun 2018 dan Isu-Isu Penting Lainnya.
3. Tanggapan Anggota Komisi IV.
4. Jawaban atas tanggapan Anggota Komisi.
5. Kesimpulan Rapat.

6. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

(KETUK PALU SATU KALI)

Setujunya nyaris tidak terdengar. Sudah diketuk palu Pak.

Bapak/Ibu Yang Kami Hormati.

Pertama-tama Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2018 yang kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. *Applause* buat KLHK, buat Bu Menteri, yang menandakan tidak adanya pelanggaran hukum atau sanksi tersembunyi serta memberikan bahwa penggunaan anggaran berjalan dengan tertib. Ini adalah prestasi yang membanggakan buat kami sebagai mitra kerja KLHK dan semoga ini akan terus dipertahankan oleh KLHK untuk tahun-tahun ke depan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 Komisi IV DPR RI meminta penjelasan kepada Saudari Menteri, atas hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan terkait temuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Keterlambatan Penyetoran BNPB Kehutanan Ke Kas Negara sebesar 9,99 Miliar selama 1 sampai dengan 17 hari. Kemudian agar dijelaskan lebih lanjut rekomendasi BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2018. Kemudian dari Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020 diketahui Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan termasuk BRG adalah sebesar 9 Triliun 219,2 Miliar Rupiah. Dibandingkan dengan pagu *definitive* Tahun 2019 Sebesar 9 Triliun 76,47 Miliar Rupiah, maka alokasi anggaran KLHK Tahun 2020 hanya mengalami kenaikan sebesar 1,57% atau sekitar 142,73 Miliar. Kami berharap agar Saudari Menteri menjelaskan soal ini, apakah juga nanti perlu ada rencana untuk menambah anggaran baru. Kami kemarin Rapat Kerja Dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mengajukan tambahan Pagu Anggaran.

Hadirin Yang Kami Hormati.

Pada Raker hari ini Komisi IV DPR RI meminta penjelasan kepada Saudari Menteri mengenai isu-isu penting:

1. Penjelasan mengenai Penyelesaian Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dalam Revisi RTRWP yaitu Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat dan mungkin ada usulan Provinsi lainnya.

2. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal Logging*. Tim Komisi IV DPR RI Bersama Tim Gabung KLHK sudah dua kali melakukan kunjungan lapangan dan melihat ada 384 *container* atau kayu ilegal dari jenis Merbau dengan nilai kira-kira 100 Miliar Rupiah. Untuk itu kami meminta penjelasan kepada Saudari Menteri terkait penegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kemudian bagaimana dengan sosialisasi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 2012, Putusan MK 35 yang berkena yang menyebutkan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara telah menjadi paradigma baru bagi pengakuan dan penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Bagaimana jika masyarakat adat memungut hasil hutan kayu dari hutan adat dan bagaimana jika terjadi konflik terkait hal tersebut? Jadi itu beberapa hal mendasar yang sampai hari ini masih menimbulkan masalah di lapangan.
3. Penjelasan dan informasi tentang penyaluran dana bergulir dari Badan Pelayanan Umum BLU Kementerian LHK.
4. Penjelasan mengenai pengembangan hasil hutan bukan kayu seperti Minyak Kayu Putih, Madu dan Hasil Hutan Bukan Kayu lainnya. Ini kami melakukan tindak lanjut RDP dengan Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan dan Perhutani beberapa waktu yang lalu. Sebagai contoh saat ini Indonesia masih impor Minyak Kayu Putih atau *Eukaliptus* senilai kurang lebih 1 Triliun Rupiah per tahun. Jadi padahal menurut ahli hanya membutuhkan 150 ribu hektar are lahan saja untuk bisa melakukan swasembada Minyak Kayu Putih, sementara banyak Kontinjensi HTI yang terbengkalai sehingga lahan menjadi tidak produktif. Kami minta penjelasan dari KLHK.
5. Penjelasan terkait bencana banjir di Sulawesi yang menurut beberapa media dikatakan akibat keberadaan usaha pertambangan dalam kawasan hutan. Banyak penambang ilegal yang tidak memiliki Amdal dan keberadaannya tidak memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat sekitarnya. Tetapi terus beroperasi sehingga merusak kelestarian alam dan menimbulkan bencana yang menyusahkan masyarakat.

Saudari Menteri, Anggota Komisi IV DPR RI Yang Kami Hormati.

Demikianlah pengantar yang kami sampaikan, selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati bersama. Kami persilakan kepada Bu Menteri dan Kepala BRG untuk menyampaikan penjelasannya di rapat pada pagi hari ini. Kami persilakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan yang terhormat.

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yang Kami Hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI.

Yang Terhormat Ibu dan Bapak Anggota Yang Kami Hormati.

Terima kasih dan kita bersyukur pada Tuhan hari ini bisa melakukan Rapat Kerja dan terima kasih atas undangan Rapat Kerja hari ini dan atas bimbingan dan interaksi yang senantiasa baik selama ini. Dan kami juga mohon izin menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri Dan Mohon Maaf Lahir Batin atas berbagai kekhilafan dalam interaksi selama ini.

Kami menyiapkan dokumen sebagai jawaban, tetapi nanti ada penjelasan-penjelasan *highlight* dari kami dan nanti akan kami lengkapi dengan catatan-catatan pertanyaan dari ataupun *note* dari yang terhormat Pimpinan mengenai RTRW, *illegal logging*, *container* dan lain-lain termasuk tanah adat. Dalam dokumen ini kami melaporkan tentang RKAKL dan RKP kemudian Evaluasi Triwulan I 2019 juga Tindak Lanjut Ikhtisar HAPSEM BPK RI Semester II Tahun 2018 termasuk isu terkini. Dan mohon izin saya juga kami mohon bisa diberikan kesempatan untuk melaporkan untuk usulan realokasi antar program, program KLHK Tahun 2019.

Pimpinan Dan Ibu/Bapak Anggota Yang Kami Hormati.

Pada bagian pertama RKAKL dan RKP di *screen* 5 bahwa untuk 2020 Pemerintah telah menetapkan arah pembangunan yaitu untuk Perkuatan Ekonomi Nasional, Investasi Dana Ekspor, kemudian Pengentasan Kemiskinan yang dalam konteks KLHK Melalui Perhutanan Sosial Reforma Agraria dan Pendampingan Kelompok Usaha Masyarakat, kemudian arah untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Rehabilitasi Das, Perlindungan Pengamanan Kawasan dan Pengendalian Pencemaran Serta Pengelolaan Sampah, Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Pencegahannya Dan Restorasi Gambut. Lalu Pembangunan Infrastruktur yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti untuk taman-taman nasional sebagai daya tarik untuk wisata dan juga penguatan pendidikan *vocational* ataupun penguatan SDM untuk siap kerja dalam jumlah yang besar.

Rencana kerja Pemerintah Tahun 2020 telah ditetapkan dengan tema Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas. Dari lima Prioritas Nasional ini yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan maka KLHK terlibat di Prioritas Nasional pertama ini. Kemudian

prioritas kedua Konektivitas dan Pemerataan. Lalu prioritas ketiga Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, pada Prioritas Nasional ketiga ini juga Kementerian LHK terlibat dan menerima mandat untuk dukungan kepada Prioritas Nasional. Lalu yang keempat Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup, pada Prioritas Nasional keempat ini juga ada mandat kepada LHK untuk dukungan kegiatan. Dan yang kelima Stabilitas Pertahanan Dan Keamanan. Dalam RKP ini beberapa *mainstream* juga ditegaskan seperti kesetaraan gender, *good governance*, tata kelola, kerentanan bencana alam dan perubahan iklim, modal sosial budaya dan transformasi digital.

Pimpinan Dan Bapak Dan Ibu Anggota Yang Kami Hormati.

Pada Rancangan RKP 2020 mohon izin kami melaporkan bahwa dari 5, 5 Prioritas Nasional dalam RKP LHK mendapatkan mandat pada 3 Prioritas Nasional dan diturunkan pada 5 Program Prioritas serta Prioritas Nasional 32 kegiatan di KLHK dan Prioritas Sektor Kehutanan. Jadi dengan demikian pada *screen* 8 itu bisa mohon izin untuk bisa diperiksa kegiatan-kegiatan menurut prioritasnya.

Kalau kita rinci misalnya pada halaman 9 dan 10 dan seterusnya, pada halaman 9 kelihatan bahwa pada Prioritas Nasional dalam kaitan dengan Pengentasan Kemiskinan. Jadi Prioritas Nasional ini Pembangunan Manusia Dan Pengentasan Kemiskinan yang isinya perlindungan sosial, akses kualitas kesehatan dan sebagainya tetapi Kementerian LHK mendapat mandat penyelesaian ataupun dukungan pada prioritas, program prioritas di reforma agraria dan perhutanan sosial. Yang secara rinci mohon periksa pada halaman 10 sampai halaman 12, dengan kegiatan penataan penguasaan dan pemilikan tora termasuk di dalamnya pelepasan kawasan hutan, penyiapan kondisi prakondisi bagi masyarakat pedesaan dan di kawasan, pengelolaan kolaboratif sumber daya, pengembangan usaha dan sebagainya dengan total dengan total proyeksi anggaran sebanyak 403,5 Miliar.

Bapak Pimpinan Dan Bapak Dan Ibu Anggota Yang Kami Hormati.

Selanjutnya pada *screen* 13, pada Prioritas Nasional ketiga yaitu peningkatan nilai tambah sektor riil industri dan kesempatan kerja, Kementerian LHK mendapatkan mandat program prioritas di peningkatan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu hilir. Kemudian di *screen* 13 pada peningkatan daya saing destinasi dan industri wisata termasuk wisata alam dan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. Terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi yang secara lebih rinci mohon periksa pada halaman 13 sampai dengan 15, dengan dukungan anggaran sekitar 312 Miliar. Jadi menyangkut kegiatan-kegiatan optimalisasi hasil hutan, BNPB, penerapan silfi kultur, legalitas kayu dan sebagainya.

Dan demikian pula pada Prioritas Nasional keempat, Kementerian LHK mendapatkan mandat dalam RKP untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air. Jadi penataan kawasan hutan, pemeliharaan pemulihan dan konservasi sumber daya air termasuk program citarum. Dan juga peningkatan kualitas lingkungan terkait dengan pencegahan, pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan, penanggulangan pencemarannya, pemulihannya dan termasuk pengawasan pengendalian dan penegakan hukum. Dengan Prioritas Nasional 4 ini mohon periksa secara rinci pada halaman 16 hingga halaman 25 dengan dukungan anggaran senilai 4,109 Triliun.

Bapak Pimpinan Dan Ibu Dan Bapak Anggota Yang Kami Hormati.

Dengan demikian pada *screen* 26 pagu indikatif Kementerian LHK sebagaimana terlihat di *screen* 26 ini yaitu 9 Triliun 219 Miliar 231 Juta 497 Rupiah yang diantaranya dialokasikan untuk gaji pegawai, tunjangan kinerja pegawai, seluruh pegawai di pusat dan di daerah yaitu 2 Triliun, 2 Triliun 11 Miliar 861 Juta. Dan untuk belanja pembelian barang atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja dan umumnya pelayanan eksternal yaitu pada *screen* 29, 29 dengan nilai 6 Triliun 417 Miliar 768 Juta Rupiah. Dari catatan Prioritas Nasional I, III, dan IV tadi secara *highlight* dan fokus mohon periksa pada halaman 30 bagi tiap-tiap program dalam konfigurasi program Kementerian LHK yaitu 11 program dengan nilai Prioritas Nasional dari 9,219 tadi maka 4,815 Triliun adalah mandat Prioritas Nasional yang diberikan kepada LHK dari RKP 2020.

Pimpinan Dan Ibu Dan Bapak Anggota Yang Kami Hormati.

Sebagai fokus sebagai kesimpulan untuk bagian RKAKL 2020 ini maka bisa kita lihat perbandingan pagu dari 2019 dan pagu untuk 2020 pagu indikatif, yaitu sebagaimana terlihat pada halaman 31 untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya 592 Miliar 759 Juta 666 Ribu Rupiah dan seterusnya mohon saya mungkin tidak bacakan satu per satu angka-angka ini. Tetapi angka-angka ini sebagai catatan untuk, untuk kami mohon ini menjadi *record* dan catatan dan persetujuan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Bapak Pimpinan Dan Ibu Dan Bapak Anggota Yang Kami Hormati.

Sebetulnya dalam usulan kami memang masih ada kebutuhan usul tambahan yang sudah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat tanggal 6 Mei yaitu usul tambahan sebesar 2,509 Triliun. Ini untuk keperluan program rehabilitasi hutan dan lahan dengan penambahan luas 100 ribu hektar. Jadi ini dimaksudkan untuk menjaga apa namanya jumlah yang sama, karena untuk katakanlah dalam kaitan dengan pengendalian perubahan iklim, kita sebetulnya butuh menanam pohon itu rata-rata 1 tahun itu 480 ribu hektar. Tapi

yang tahun 2020 ini baru 300 ribu, jadi yang 2019 kemarin 280 ribuan hektar, sebelumnya rata-rata hanya 25 ribu hektar. Jadi terima kasih yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV sudah mendukung untuk hampir 10 kali lipat didalam penanganan ataupun program untuk rehabilitasi hutan.

Selanjutnya juga dalam usul tambahan ini, kami mengusulkan jadi dari 2,509 itu rinciannya 1,5 untuk rehabilitasi hutan dan lahan kemudian untuk pengelolaan sampah, sampah senilai 300 Miliar. Dan untuk dukungan dana dekonsentrasi untuk pembinaan tugas pembantuan kepada KPH dengan nilai 150 Miliar, serta kegiatan pendukung untuk pemantauan kualitas udara sebesar 159 Miliar, serta untuk pemulihan gambut dukungan tambahan sebesar 200 Miliar Rupiah. Demikian yang kami laporkan dalam kaitan dengan RKAKL untuk 2020.

Pimpinan Dan Ibu Dan Bapak Anggota Yang Kami Hormati.

Selanjutnya izinkan kami melaporkan untuk realisasi anggaran KLHK pada Triwulan Pertama Tahun 2019 mohon periksa pada halaman 33. Jadi sampai dengan tanggal 19 Juni, jadi sebelum akhir Triwulan Kedua, realisasi anggaran untuk LHK pada Tahun 2019 yaitu 27,88%. Jadi kita kalau dilihat disini bahwa yang masih dibawah 20% yaitu pengendalian DAS dan hutan lindung. Ini karena masih dalam proses pengadaannya Pak Sekjen masih penyelesaian kontrak-kontrak, demikian pula yang di pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi sebetulnya bisa *on track* dengan penyelesaian-penyelesaian administrasi ini. Itu pada bagian kedua yang kami laporkan.

Selanjutnya izinkan kami melaporkan pada bagian ketiga yaitu terkait dengan tindak lanjut HAPSEM BPK RI Tahun 2018 Semester II. Terima kasih atas dukungan dan arahan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, bahwa pada Tahun 2018 kemarin kami juga KLHK mendapatkan predikat kembali Wajar Tanpa Pengecualian. Namun demikian beberapa temuan dari HAPSEM laporan pemeriksaan KLHK Tahun 2018 dan telah kami lanjut tindak lanjuti berupa kaitan temuan dengan sistem pengendalian *intern*. Seperti misalnya keterlambatan penyetoran, kemudian pengelolaan PNBP yang belum teridentifikasi, pelaksanaan belanja barang, peralatan dan mesin yang terkait dengan keberadaannya dan sebagainya di halaman 36. Dan juga ada temuan kepatuhan menyangkut kelebihan pembayaran atas anggaran belanja, kekurangan volume pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pengadaan barang jasa maupun kelemahan dalam arti tidak cermat, sehingga dianggap menjadi boros dan juga dalam hal administrasi pemotongan.

Nah seluruh temuan BPK ini telah ditindaklanjuti. Jadi kita sudah selesaikan termasuk penyetoran-penyetoran yang harus dilakukan juga telah dilakukan. Jadi bagaimana langkah-langkah tindaklanjut dari rekomendasi BPK RI ini seperti terlihat pada halaman 4, 38 hingga halaman 43. KLHK juga secara

intensif melakukan konsultasi kepada BPK RI untuk semakin disiplin di dalam anggaran.

Kalau kita lihat pokok-pokok persoalannya itu berkaitan dengan harusnya otomatisasi sistem, jadi kalau lambat-lambat bayar itu kalau dia otomatis sistem bisa langsung didebet misalnya itu. Jadi ini rekomendasinya otomatisasi sistem. Termasuk integrasi sistem, misalnya dari PNBP, PHPL itu harus langsung terkait dengan sistem informasinya ke Biro Keuangan. Jadi kami tindak lanjuti ini dengan memperbaiki sistem-sistem juga pengawasan terhadap pembayaran atas izin-izin. Misalnya izin pinjam pakai kawasan hutan untuk keperluan lain terutama pertambangan. Selain itu juga aspek juknis-juknis yang harusnya memang di, ditaati betul dan untuk kesempatan ini kami akan dan telah memberi memberikan tindak lanjut untuk peningkatan pengawasan dan saya akan mengikuti terus pengawasan ini. Jadi termasuk yang soal aset juga kita akan tindak lanjuti dan pengawasannya terus akan dilakukan. Jadi demikian pada bagian yang ketiga menyangkut HAPSEM BPK RI Periode Semester II 2018.

Selanjutnya sesuai dalam dokumen, pada halaman 46 hingga halaman 80 ini melaporkan soal banjir. Saya kira kami melaporkan *highlight*-nya saja mohon izin. Bahwa banjir ini dengan curah hujan yang tinggi pada daerah aliran sungai Konaweha DAS Masolo, jadi karena memang debit airnya sangat tinggi di halaman 54, debit air sangat tinggi ternyata sebetulnya kapasitas pengalirannya hanya 22m³ per detik, padahal debit air yang ada pada saat itu 292m³ per detik. Kemudian kalau kita lihat lagi di halaman 57 memang disitu ada pertambangan ada perkebunan juga ada penebangan liar dan perambahan hutan. Jadi kondisi *land use* tata ruangnya relatif buruk, curah hujan tinggi, pendangkalan sungai juga terjadi, jadi Kementerian LHK juga sudah turun ke lapangan. Dan kita akan memperbaiki bersama-sama Kementerian PU drainasenya sistem drainase dan KLHK berkewajiban untuk dan kita persiapkan untuk penanganan konservasi tanah dan air. Jadi dengan bangunan-bangunan cekdam, bukan cekdam, DAM penahan kalau cekdam terlalu besar, DAM penahan, penanganan penguatan tebing-tebing dan tentu saja penanaman pohon. Kemudian ini, demikian kurang lebih terkait dengan penanganan banjir.

Selanjutnya terkait dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada halaman 81 hingga halaman 111. Itu pada dasarnya Kementerian LHK memang pada aspek kehutanan kita mulai mengenalkan paradigma baru untuk konsentrasi juga ke hasil hutan bukan kayu. Kayu putih secara data rincinya ada di sini, secara fakta di lapangan saya sudah lihat langsung yang di Boyolali, memang sangat potensial dan sangat bagus seperti tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Pimpinan. Jadi sistem budi daya *agroforestri tumpang sari* di terus, terus, ya penuh modal ya dan seterusnya balik, ya sebelumnya ya ini jadi sistemnya tumpang sari pola tanamnya tadi seperti yang Bapak Pimpinan juga

katakan, bahwa bisa ada kayunya bisa ada Kayu Putih, bisa ada sawah, bisa ada *follow* hijau dan lain-lain.

Jadi memang inilah yang didorong sebetulnya di format perhutanan sosial. Jadi kalau kita lihat terus halaman berikutnya, perhutanan sosial seperti ini sekarang sudah direalisir 3,096 juta hektar. Jadi nanti apa namanya, penggunaannya sih usaha taninya sih bisa macem-macem, tapi Kayu Putih di Pulau Jawa itu termasuk yang sangat potensial. Lihat *screen* berikutnya, ya ini dia 144 ribu jadi sudah ada di 346 akses kelola hutan sosial di Pulau Jawa yang sangat potensial.

Jadi sebetulnya peralatannya juga cukup sederhana sebetulnya yang penting ada *destilasi*, ada daun-daun kayu putihnya dan sebagainya. Kita lihat lagi sekarang di *screen* 9, 90 sebentar di *screen* 94. Ini sebaran pabrik minyak kayu putih yang di Pulau Jawa, di LMDH di Banten ada, di Ciminyak Jawa Barat ada, di Tonjong, Jatimunggul, Majalengka, Banyumas, Surakarta, Sukun, Saradan dan sebagainya. Jadi ini datanya sudah ada dan kalau kita lihat ini juga sebetulnya bukan hanya di Jawa, di Papua juga, kemudian Litbang KLHK sendiri juga melakukan penelitian untuk ini dan lingkungan. Dan sebetulnya kalau dilihat pemanfaatan ini juga bisa dilakukan di wilayah-wilayah zona tradisional dan, dan pada halaman 106 hingga 111 itu sudah ada catatan kawasan-kawasan konservasi yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Apakah itu kayu putih, madu hutan, getah pinus dan sebagainya.

Bapak Pimpinan Dan Ibu Dan Bapak Anggota Yang Kami Hormati.

Tentu saja untuk, untuk dukungan kepada kayu putih ataupun usaha tani lainnya di dalam kawasan hutan sosial kita membutuhkan dukungan dengan dana bergulir, yang dalam dokumen kami pada halaman 112 sampe dengan halaman terakhir 141. Kalau kita lihat dana bergulir memang memberikan dukungan dan lihat di *screen* 116, coba dibuka ya Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati, saya mohon izin mohon periksa untuk *screen* 116 ini, bahwa ada pembiayaan usaha kehutanan yang diberikan melalui Badan Layanan Umum KLHK dengan calon debiturnya adalah LMDH pemegang keputusan untuk pengakuan dan perlindungan.

Jadi Perum Perhutani juga bisa, Badan Usaha yang bekerja sama dengan Perhutani atau masyarakat pemegang izin juga bisa. Nah kalau kita lihat datanya untuk Badan Usaha *plafond* maksimumnya 40 Miliar BI *rate*-nya, bunganya *rate*-nya BI *rate* +4%, untuk Perhutani juga ada dan untuk kelompok masyarakat *plafond*-nya 200 juta per kelompok dengan *rate*-nya menurut BI *rate* dan sebagainya. Nah dengan dukungan, dengan dukungan BLU ini, disini sudah ada gambaran dan informasi tentang *cash flow*, sehingga sebetulnya bisa kita lihat di *screen* 122 bahwa kalau kita punya, kalau kelompok tani punya 750 hektar dia bisa menghasilkan produksi 6, 6 ton lebih hampir 7 ton, maka pendapatannya bisa 16 Miliar per tahun dan dengan demikian laba kotornya

bisa 5,4 Miliar. Jadi sebetulnya pengusahaan ini untuk dikombinasikan dengan usaha-usaha perhutanan sosial, sebetulnya menjadi sangat prospektif.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota Yang Kami Hormati.

Tentang hutan adat, saya mohon izin melaporkan bahwa pemetaan hutan adat yang dilakukan secara partisipatif oleh para itu pernah diserahkan pada KLHK pada tahun 2016 awal dan kita terus melakukan penelitian yang diusulkan itu kira-kira 6,3 juta hektar. Dalam hal ini diskusi-diskusi dilakukan bersama KLHK dan para serta kelompok-kelompok masyarakatnya sendiri. Karena pada dasarnya kalau hutan, kalau wilayah adat itu berada dalam kawasan hutan maka dia harus mendapatkan pengakuan dulu. Karena di dalam Undang-Undangnya dikatakan seperti itu, Undang-Undang 41 maupun yang hasil PMK nya. Itu dikatakan bahwa hutan adat dengan pengakuan identitas masyarakat hukum adatnya. Nah yang sudah punya identitas masyarakat hukum adatnya itu, ada kiranya sekarang mungkin sudah 40 ribuan hektar, 40 ribu ada ya? 40 ribu hektar.

Tetapi Pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang kami hormati, untuk masyarakat adat dan para aktivis juga masyarakat terus mengikuti perkembangan ini. Memang kalau kita menunggu terus-terusan penyelesaian Perda itu terlalu lama. Oleh karena itu untuk menjaga bahwa wilayah adat ini tidak terganggu untuk keperluan yang lain maka kita menetapkan dalam bentuk wilayah, wilayah indikatif untuk hutan adat. Jadi wilayah indikatif hutan adat itu sekarang sudah 472, 472 ribu hektar. Jadi sambil menunggu Perdanya selesai, maka dia akan keluar wilayah hutan adatnya jadi kira-kira seperti itu, oleh karena itu kemudian dia akan menjadi jalan keluar.

Nah terkait dengan pemanfaatan ataupun usahanya, sekarang ini yang diatur masyarakat hutan adat masih hasil hutan bukan kayu. Jadi belum untuk kayu, memang sudah pernah ada Peraturan Gubernur Papua, Papua yang memberikan izin untuk kayu bagi masyarakat hukum adat. Nah ini sedang terus dipelajari oleh KLHK dan kita merencanakan di Bulan Juli ini akan dilakukan penajaman akhir, belum jadi Pergubnya itu belum sejalan dengan muatan dari Undang-Undang 41, sehingga ini masih kita terus bahas dan kita diskusikan.

Tentang RTRW, saya mohon izin melaporkan bahwa ini datanya perkembangannya ini 9 Provinsi masih berproses dan 11 Provinsi telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Progres persetujuannya yang nanti kami akan siapkan secara tertulis ini Pimpinan, jadi yang sebentar, yang, yang masih berproses yang belum selesai yaitu Sulawesi Tenggara, Babel, betul tadi yang sampaikan oleh Pimpinan, Kepri, Sumsel, Kalimantan Barat, Riau, Papua Barat, Sumatera Utara dan NTT.

Untuk penyelesaian ini sebetulnya sudah dilakukan kunjungan-kunjungan kerja oleh Panja Komisi IV terkait dengan DPCLS. Saya kira pada tanggal 14

Juni, 6 Juni terakhir 2018 sudah, sudah dilakukan rapat-rapat kerja dan yang terakhir dilakukan pada rapat kerja beberapa waktu yang lalu terkait dengan Sumatera Selatan ini sudah sebagian diselesaikan. Jadi Pimpinan saya kira kami akan melaporkan secara tertulis dan bagaimana langkah selanjutnya, mudah-mudahan sih harusnya Bulan Juli sudah bisa ada penyelesaian, harus seperti apa. Jadi sehingga apabila harus diselesaikan di antara Bulan Juli sampe dengan Agustus, nanti kita, kami nanti akan berkonsultasi secara langsung kepada yang terhormat Pimpinan komisi IV DPR RI.

Bapak/Ibu Yang Kami Hormati.

Yang Terhormat Pimpinan Komisi IV dan Ibu dan Bapak Anggota Yang Kami Hormati.

Selanjutnya pada bagian akhir saya mohon izin untuk melaporkan bahwa hingga Juni 2019, Kementerian LHK berasal dari kegiatan RHL pada program DAS dan hutan lindung, dari proses pengadaan itu ternyata terdapat, terdapat sumber untuk optimalisasi pencapaian serapan anggaran untuk 247,6 Miliar Rupiah. Dalam usulan untuk optimalisasi ini kami mohon izin melaporkan pada halaman 141 dan 140, 140 dan 141, bahwa usulan realokasi ini akan dialokasikan untuk penambahan belanja pegawai, atas peningkatan tunjangan kinerja dan kegiatan-kegiatan dan saya kira nanti ini bisa didalami lagi lebih lanjut untuk perincian. Dan kami akan melaporkan secara tertulis tentang hal ini.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota Yang Kami Hormati.

Saya kira itu yang ingin kami laporkan dan mohon arahan, catatan dan dukungan selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Demikianlah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Peserta Rapat.

Beberapa hal penting yang telah disampaikan oleh Bu Menteri. Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota, untuk merespon, menanggapi beberapa hal penting yang telah tadi disampaikan.

Yang pertama, Pak Budisatrio Djiwandono. Siap-siap Pak Salim Fakhry.

F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang Saya Hormati Pimpinan Komisi IV.

Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Beserta Jajarannya.

Pertama-tama dalam suasana masih memperingati Hari Suci Idul Fitri perkenankan saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan juga Mohon Maaf Lahir Batin kepada semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pertama-tama, apresiasi saya kepada Bu Menteri dan Jajarannya yang sudah menjalani hubungan dengan sangat baik, bersama kami di komisi IV khususnya kami di Kalimantan Timur dengan program-program bantuan yang telah dihadirkan oleh KLHK untuk masyarakat Kaltim pada umumnya.

Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyoroti sebuah fenomena yang saya perhatikan terjadi di Ibukota kita tercinta yaitu Jakarta. Fenomena yang saya maksud ini adalah fenomena kualitas udara, ya kami perhatikan tahun lalu Ibukota Jakarta ini meningkat, mendapatkan peringkat nomor urut satu dalam hal kualitas udara terburuk di seluruh dunia, terburuk rata-rata tahun lalu.

Beberapa bulan terakhir ini saya karena saya ini senang olahraga Bu, saya senang bangun pagi untuk menikmati saya kira udara segar tapi kenyatannya saya perhatikan akhir-akhir ini banyak sekali hari-hari yang agak *hazy*, agak kayak berasap gitu. Kan kebetulan saya ini mempunyai aplikasi di *hp* saya namanya *air visual* Bu, ini aplikasi yang dibuat oleh Perusahaan Swiss yaitu IQR, dia membuat memproduksi alat-alat untuk *air verification system* sama juga untuk memantau kualitas udara. Dan setiap hari saya perhatikan kualitas udara kita ini dari pagi sampai pun malam hari ini rata-rata diatas *hybrid/air bridge* atau kualitas udara yang sangat-sangat jelek. Kalau partikel *pm 2,5* nya itu rata-rata diatas 100 Bu. Dan menurut *World Health Organization* (WHO) rata-rata *pm 2,5* yang *acceptable* itu kira-kira di 25. Ini di Jakarta akhir-akhir ini setiap hari itu diatas 100. Dalam hal ini saya cuma ingin mendapatkan gambaran yang mungkin lebih lengkap Bu. Saya di sini tidak mau mencari kesalahan, saya di sini ingin mencari informasi mencari fakta dan sekaligus saya ingin menawarkan apa yang bisa saya dan kami bantu Ibu Menteri dan teman-teman di KLHK. Untuk membantu memitigasi permasalahan ini menurut saya sudah sangat, sangat, sangat kritis.

Kalau kita mau anak dan cucu kita mendapatkan hari-hari yang lebih baik, kita perlu memberikan mereka kesempatan menghirup udara yang baik udara yang segar. Udara yang kotor ini yang sangat rentan berisiko untuk sakit dalam hal ini adalah mereka yang berusia udah lebih lanjut dan mereka yang berusia sangat, sangat muda. Dan saya sangat prihatin atas masalah ini.

Tadi Bu Menteri sudah menjelaskan melalui program-programnya dan arah pembangunan LHK tahun 2020 dan saya apresiasi betul salah satunya tadi saya lihat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan saya lihat dari program-programnya sudah ada tadi rencana-rencana Ibu untuk memitigasi permasalahan kualitas udara ini. Tapi saya lihat tadi mungkin banyak dari program-program itu yang sifatnya mungkin jangka menengah maupun

panjang. Saya mungkin ingin mendapatkan gambaran apa sih yang sekarang sedang dilakukan oleh KLHK untuk mempercepat pemulihan masalah ini, apa juga yang bisa kami bantu dari komisi IV untuk mempercepat kerja untuk menanggulangi permasalahan ini di teman-teman KLHK. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Mas Budi setuju ya, Ibu kota pindah kalo gitu ya?

F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Khususnya Kalimantan Timur Pak, saya sangat mendukung Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mas Salim Fakhry siap-siap. Mas Ono Surono.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan Dan Bapak Ibu Komisi IV Yang Kami Hormati.

Ibu Menteri Dan Jajarannya Yang Kami Hormati.

Marilah bersama-sama kita memanjatkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada masih bulan yang baik ini marilah kita saling memaafkan antara Komisi IV khususnya dan Mitra Komisi IV.

Ibu Menteri Yang Kami Hormati.

Ini Bapak Pimpinan, saya khusus memang berbicara masalah Aceh, karena Dapil saya Dapil Aceh. Tadi Mas Budi dari Kalimantan berbicara masalah Ibukota, saya khusus untuk Aceh.

Ibu Menteri, Provinsi Aceh yang terkenal dengan Taman Nasional Gunung Leuseur, saya kira Ibu Menteri dan Pak Sekjen dan jajarannya sudah paham betul. Baru-baru ini Ibu Menteri karena Taman Nasional Gunung Leuseur itu adalah kebanggaan Indonesia dan kebanggaan dunia, seringnya banjir bandang khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara. Apalagi curah hujan yang sangat luar biasa, ada beberapa titik lokasi saya kira kalau ada perhatian khususnya dari Kementerian. Karena hutan di Kabupaten Aceh Tenggara

tersebut beberapa puluh tahun yang lalu memang *illegal logging* Bu. Namun sekarang hampir saya pastikan sudah jauh berkurang, namun masih ada, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara. Harapan saya sebagai Anggota Komisi IV, mohon kiranya kepada Kementerian untuk bisa membuat program sepanjang hutan Taman Nasional Gunung Leuseur di Kabupaten Aceh Tenggara mungkin kita melaksanakan reboisasi, tadi menarik ada Ibu Menteri paparkan bisa tanam ini, tanam itu.

Satu lagi Ibu Menteri, ada itu namanya di Desa Natam, itu kalau tidak kita tanam mungkin tanaman keras di pegunungan tersebut selalu longsor. Ini kiranya perlu perhatian yang secara khusus. Tadi Ibu Menteri katakan ada DAM, pengamanan tebing, inilah mohon kiranya perhatian dari kementerian.

Ibu Menteri Yang Saya Hormati.

Baru-baru ini di Kabupaten Aceh Tenggara ada pembangunan PLTM Lawe Sikap, yang terletak di Kecamatan Babussalam Desa Batu Mbulan. Indikasi PLTM tersebut diduga menerima kayu yang tidak bertuan. Kementerian sudah memerintahkan dari Kementerian yang ditandatangani oleh Bapak Direktur, pencegahan dan pengamanan hutan tertanggal 10 Juni kalau saya tidak salah Bu dan sudah ketemu dengan saya ada empat personil dari Kementerian yang Ibu perintahkan melalui Bapak Direktur. Surat tugas tersebut kalau juga saya juga tidak salah harus melaporkan kepada mungkin Pak Dirjen dalam waktu tujuh hari. Hasil temuan tersebut apakah sudah sampai kepada Ibu? Karena bukti *illegal logging*-nya semua ada pada saya. Mohon kiranya yang katanya kayu tersebut diambil dari perhutanan masyarakat, yang berbatasan langsung dengan kawasan zona inti Taman Nasional Gunung Leuseur dan pada tanggal 12 Juni lalu Polres Aceh Tenggara sudah mengadakan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut. Namun, foto-foto semua ada Bu, saya kira Ibu tugaskan melalui Bapak Direktur yang ada yang ke Aceh Tenggara sudah memberikan juga foto-foto kepada saya.

Mohon kiranya ketegasan daripada Kementerian Lingkungan Hidup, apakah ini memang benar ada *illegal logging*? Ataupun dampak PLTM tersebut terhadap katakanlah air di Kabupaten masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara tersebut. Mohon kiranya untuk ditindaklanjuti, agar ini karena dalam dua minggu terakhir seluruh pemberitaan *mass media* di Aceh mengangkat persoalan ini, namun saya heran tanggal 10 surat tugas hari ini tanggal 20 sekian, belum ada hasil daripada laporan tersebut. Ini khusus untuk PLTM Lawe Sikap. Dalam arti kata Bapak Pimpinan mohon maaf bukan saya pribadi tidak setuju terhadap keberadaan PLTM tersebut, namun akibat dibangunnya PLTM tersebut bisa menimbulkan pencemaran. Ini kiranya pada rapat ini mohon kiranya kepada Ibu Menteri dan Jajarannya dapat nanti memberikan mungkin masukan kepada kami. Karena kami adalah Dapil Aceh dan PLTM

tersebut berjarak dikediaman saya lebih kurang 4km cuman Pak Ketua, karena saya asli putra Aceh Tenggara.

Selanjutnya Ibu Menteri, beberapa tahun yang lalu saya sudah lupa mungkin, karena lupa Pak apa Pak Dirjen apa namanya Wiratno, Winarno, saya lupa Bu. Karena janji beliau ini ada datang ke Aceh Tenggara sama saya sampe sekarang belum dipenuhi dan janji beliau akan membangun di Gurah tersebut sebuah villa Pak Ketua, karena saya lupa nama beliau ini mungkin karena beliau janji beliau lupa.

KETUA RAPAT:

Pak Wiratno.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Siapa Pak?

KETUA RAPAT:

Pak Wiratno.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Oh. Saya hafal ini Pak. Karena beliau pernah jadi Kepala Taman Nasional Gunung Leuseur. Kenapa saya lupakan? Karena beliau pun lupa Pak, sebab udah dua tahun ini Ibu Menteri. Jadinya saya kira kalau ada janji-janji Ibu Menteri, kalau ndak bisa kita penuhi berkata dalam Raker ataupun RDP.

Tadi Ibu Menteri menyatakan apa lagi, satu lagi Pak Ketua. Saya kira Ibu Menteri kami setuju, umpamanya apa namanya tadi dipaparkan rekap akses perhutanan sosial di Pulau Jawa. Namun, Ibu Menteri harus kita pahami, kita ini hidup di Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Bukan kami tidak setuju semua ini di Pulau Jawa, tidak, namun sebagai putera Indonesia yang juga berbendera merah putih apa salahnya jangan Jawa-Jawa saja yang diperhatikan ada sikit-sikit di Sumatera, di Kalimantan, saya kira tidak salah Pak Ketua saya untuk mengungkapkan ini. Sudahlah Ibukota di Pulau Jawa, kalau ada nanti dari Aceh nanti minta referendum, ini tanda kutip Ketua ribut nasional. Saya pun tidak setuju, saya cinta NKRI, namun untuk ini juga ini contoh Pak Ketua Taman Nasional Gunung Leuseur itu luar biasa Pak Ketua. Diakui oleh dunia, diakui oleh Undang-Undang namun perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup ada, cuman tidak sempurna. Kita juga paham sebagai manusia, tidak mungkin sempurna semua. Namun, hendaknya jangan di Pulau-Pulau Jawa aja Pak Ketua. Kita juga butuh disana.

Masalah yang dibilang Ibu Menteri tadi dukungan moral, saya kira dari Komisi IV tidak usah Ibu Menteri ragukan. Dukungan kami, doa kami kepada Ibu Menteri dan Jajarannya, walaupun kami hanya 98 hari lagi jabatan sebagai Anggota DPR RI, Ketua mohon maaf yang lanjut nanti ya ikutlah nanti, yang

tidak lanjut ya kurang rejeki namanya Ketua. Terima kasih Pak Ketua, mohon maaf Ibu Menteri, tadi ada udah saya tulis bank sampah, gapapa sama Pak Sekjen aja bisik-bisik itu langsung bisa dapat pak.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Nanti tetap di Komisi IV kan? Masih ya. Rambutnya baru itu Mas Ari.

Mas Ono Surono, siap-siap Pak Rahmad Handoyo.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Ya terima kasih, Pak Viva, Pimpinan.

Yang saya hormati Ibu Menteri Beserta Seluruh Jajarannya.

Yang pertama saya mengucapkan *Minal Aidin Wal'faidzin*, Mohon Maaf Lahir Dan Batin. Yang kedua saya memberikan apresiasi terhadap Ibu serta seluruh jajarannya, karena BPK mengganjar kembali dengan WTP. Nah yang kedua pagu indikatif naik dari 8 Triliun menjadi 9, tentunya ini menjadi komitmen kita bersama Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu harus terus menjadi fokus dari Pemerintah kita.

Ibu Menteri, bicara terkait dengan arah pembangunan LKH Tahun 2020 pada poin 2, melakukan pengentasan kemiskinan melalui perhutanan sosial, tora dan pendampingan usaha pada kelompok masyarakat dan kelompok tani hutan mandiri. Ini kan merupakan program yang revolusioner menurut saya, amanat pendiri bangsa terkait dengan reforma agraria ini benar-benar terjadi sekarang. Dan saya sampaikan terima kasih di Dapil saya di Indramayu sudah 1.144 hektar lahan di PHPS sudah di SK-kan dan ini merupakan proses yang panjang. Nah tapi tentunya dengan hal yang sangat baik ini disaat dulu isu-isu gerakan-gerakan petani yang selama ini menguasai atau menggarap lahan milik Perhutani, mereka kan selalu berjuang untuk mendapat kepemilikan, mendapatkan sertifikat.

Nah tetapi dengan program IPHPS ini kan membuka mata mereka, bahwa memang ada kebijakan Pemerintah yang membedakan antara lahan-lahan hutan yang dikuasai oleh Perhutani di Jawa dengan lahan-lahan hutan yang di luar Jawa yang programnya melalui tora. Nah sehingga dari mungkin sekitar 800 Kepala Keluarga di Indramayu akhirnya dengan SK yang sudah keluar itu kan yang lainnya berbondong-bondong untuk mengajukan ataupun memohon hal yang sama. Nah sehingga saya perlu penjelasan lebih detail terkait dengan masyarakat yang akan mengajukan atau sudah dalam proses mengajukan kembali, dikarenakan memang mereka pun ya seniatannya sudah menggarap lahan-lahan milik Perhutani tersebut.

Nah di sisi lain Ibu Menteri, mohon juga menjadi catatan bahwa di saat yang bersamaan keluar pula sebuah surat keputusan melalui program P.83 Kulin KK, kepada satu perusahaan di Indramayu yaitu perusahaan singkatannya URS, saya gak tahu apa kepanjangannya. Dan itu saat ini mereka sedang membangun pabrik tebu di Kabupaten Indramayu. Mungkin sekitar kalau tidak salah saya mendengar ada 6.000 hektar yang sudah diberikan izin kepada mereka. Yang tentunya di dalamnya pun sebenarnya sudah ada masyarakat yang menggarap lahan-lahan tersebut dan sudah dalam bentuk sawah atau padi. Nah disaat mereka senyatanya masih menggarap terus perusahaan ini juga mengajukan dan sudah dikeluarkan SK jadi mohon dicek apakah memang perusahaan itu sudah melakukan komunikasi secara tuntas, kepada masyarakat-masyarakat yang menggarap lahan itu. Karena kan isu yang menjadi besar di Kabupaten Indramayu sebelum masalah ini juga, kemarin konflik antara pabrik gula jati tujuh dengan masyarakat di sekitar pabrik gula tersebut, yang menginginkan masyarakat diberikan hak untuk menggarap lahan yang selama ini digarap oleh pabrik gula Jati Tujuh. Karena mereka belum membayar ganti rugi, ganti lahan nah sehingga mereka menganggap bahwa ini lahannya belum dibayar oleh, oleh pabrik gula sehingga mereka pun mempunyai hak, yang saat ini mereka juga akhirnya menggarap lahan-lahan tebu itu dan merubah menjadi sawah.

Nah kemarin konfliknya dengan BUMN, nah terakhir kita mendengar konfliknya sudah konflik horizontal, sudah ada satu nyawa yang dikorban yang menjadi korban akibat dari konflik itu. Nah sehingga ini perlu benar-benar dicek kembali untuk menghindari terjadinya konflik. Kalaupun memang masyarakatnya mau untuk beralih dari sawah menjadi tebu, ya gak ada masalah. Tapi pada saat misalnya ini cuma sepihak saja dari perusahaan itu yang ingin membangun ataupun menanam tebu di lahan milik Perhutani tanpa melibatkan masyarakat, terus ada juga isu-isu terkait dengan bukan P.83 tapi malahan mereka diisukan awal itu, mereka akan mendapatkan sertifikat seperti tora di luar Jawa. Nah sehingga sekali lagi mohon ini menjadi catatan Ibu dan mohon timnya untuk segera turun di Kabupaten Indramayu. Itu saja Ibu Menteri.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mas Ono Surono.

Selanjutnya kami persilakan Mas Rahmad Handoyo. Siap-siap Bapak Hasanuddin.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Teman-Teman Komisi IV.

Ibu Menteri Yang Saya Hormati.

Yang pertama tentu saya mengucapkan *Minal Aidin Wal'faidzin*, Mohon Maaf Lahir Batin. Yang kedua tentu sebuah apresiasi juga sebuah kewajiban saya kira untuk WTP itu, karena dikatakan prestasi juga tidak tetapi kalau tidak juga memang itu sebuah prestasi karena itu suatu keharusan, karena itu sebuah standar itu, standar instansi negara. Tolong tetap untuk dipertahankan jangan sampai turun Ibu Menteri dan saya percaya untuk ke depan masih bisa untuk terus dipertahankan. Standar ini, selamat untuk itu.

Berikutnya Ibu Menteri, saya senang rapat terakhir kemarin RDP salah satunya adalah membahas kerakyatan ekonomi yang di *pilot project* yang dari Kementerian Kehutanan. Salah satunya adalah pengembangan perhutanan sosial, dalam ini lebih spesifik lagi adalah apa namanya kayu putih. Namun pada kesempatan yang baik ini saya tidak mengulas disitu Ibu, tetapi daya dukungnya untuk *support* itu yaitu adalah Lembaga Dana Bergulir.

Saya coba mengkritisi Ibu Menteri ini Lembaga sudah 10 tahun dengan anggaran yang diberikan negara 2 Triliun, yang sudah terserap 700 Miliar sekian yang belum 1,2 Triliun. Saya ngebayang sebagai *compare* pembandingan di Kementerian Kelautan baru 3 tahun ini 3 tahun, tidak lebih dari 700 Miliar yang sudah tersalur hampir 50%, *bad debt*-nya 0%, gimana caranya kredit macetnya 0% itu. Nah ternyata Ibu Menteri juga disamping itu juga ada di Kementerian Kelautan sekian Triliun itu juga sudah luar biasa *massive* proses *loan*-nya kepada yang berhak menerima. Ternyata ini adalah Lembaga BLU yang diambil alih ataupun dibina ataupun diterbitkan itu dari Kementerian terkait dengan Kementerian Keuangan. Nah disitu adalah diatur bagaimana manajerialnya, prosesnya dan tanggungjawabnya, tupoksinya itu diatur detail.

Nah yang saya kritisi disini adalah manjerialnya Ibu, saya salut yang bekerja itu bukan PNS, yang bekerja itu adalah orang ahli-ahli yang tugas dan fungsinya adalah yang mengerti menjual dan mengelola keuangan itu bagaimana bisa disampai dan bagaimana bisa mengerti studi kelayakan dan bagaimana biar ketika di survey itu tidak macet, dan bagaimana ketika tujuan Pemerintah membantu yang belum *bankable* itu bisa dirasakan. Dan *Subhanallah* saya coba tanya kepada Lembaga Keuangan yang lain perbankan orang bilang, ada tidak yang *bad debt*-nya 0%, tidak ada. Karena mereka ternyata ahli gitu lho, bener-bener ahli. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya mencoba untuk mengajak kita bersama untuk mengkritisi, untuk menyempurnakan, 2 Triliun itu banyak. Nah saya secara menyeluruh memang belum melihat, mengevaluasi secara menyeluruh belum, Dana Lembaga Peminjam karena memang mohon maaf ini kan masih di bawah 2 Triliun itu di

bawah kesejahteraan secara tidak langsung, tetapi yang secara langsung adalah Kepala Pusat Pembiayaan.

Saya mengusulkan Ibu Menteri, karena ini adalah mulia sekali Kementerian Kehutanan khususnya dan secara khusus Pemerintah memberikan membentuk Lembaga Pembiayaan Dana bergulir ini dalam rangka untuk diberikan ke rakyat, kemudian rakyat menerima, diberikan lagi kepada BLU dan BLU itu digulirkan kembali terus walaupun itu nirlaba.

Saya membayangkan kalau 2 Triliun itu tiap tahun terserap sesuai dengan target, saya berbahagia sekali kalau 2 Triliun itu terserap semua kemudian terus bergulir dan bergulir, bergulir, berapa puluh ribu orang yang bisa mendapatkan akses azas manfaat itu. Nah rekomendasi saya pada kesempatan yang mulia ini Ibu Menteri, tolong untuk dikaji kembali yang lebih disempurnakan, bagaimana agar 2 Triliun itu biar terserap dan bisa termanfaatkan semuanya. Apakah diangkat Direksi khusus? Yang membidangi ahli bagaimana untuk mengelola pembiayaan untuk bisa disampaikan kepada yang berhak.

Dan saya berharap Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan itu hanya sebatas fungsi Komisaris saja, pengawasan saja. Kalau di Kelautan ada fungsi pengawas itu Eselon I, Kementerian Keuangan juga ada Eselon I, tapi ada juga fungsi pengawasan yang diambilkan dari orang yang professional. Demikian juga dari LPDP (Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir) yang di Kementerian Koperasi, itu ada dua manajerial *board of director* dan *board of commissaris* yang diwakili dari Pemerintah dan yang professional. Dan yang jelas mohon maaf, manajerialnya itu pasti orang yang professional bukan bermaksud bahwa yang sudah dikelola oleh Kementerian atau BLU ini tidak benar tidak, tapi saya hanya mengatakan dari alokasi 2 Triliun yang baru terserap secara kasat mata itu 2 Triliunan saya kira kok belum optimal, sayang Ibu. Nah mohon maaf apabila *urun rembuk* saya itu bisa dipertimbangkan. Satu itu.

Yang kedua terkait dengan kayu putih saya kira saya *support* kemarin menjadi bahasan diskusi yang menarik, kalau perlu itu APBN juga bisa digulirkan kesitu. Termasuk bagaimana Perhutani menjadi bapak angkat kalau memang itu di *support* dengan BUM apa namanya APBN mengapa tidak? Mengapa tidak? Saya kira kalau terkait dengan BUMN yang berbidangi dengan kehutanan dan langsung bersentuhan dengan rakyat, saya *support* betul. Jadi itu mohon untuk bisa dikaji lagi pada saat nanti pembahasan lebih lanjut, kira-kira yang lebih spesifik lagi jangan hanya sebatas kayu putih. Tapi karena ada potensi-potensi yang dalam rangka Pemerintah menugaskan Kementerian Kehutanan dalam rangka untuk men-*support* skala prioritas pembangunan salah satunya adalah bidang ekonomi. Ini menjadi salah satu *pilot project* untuk bisa dibanggakan di kemudian hari.

Nah berikutnya terkait dengan anggaran yang naik, signifikan saya kira dibandingkan dengan Kementerian yang lain, 2 Triliun naiknya, dari 9 Triliun menjadi itu ya. Agar saya sekali lagi tidak cumi-cumi Bu Menteri, mohon untuk giat menanam itu menjadi salah satu prioritas untuk diberikan porsi. Kalau anggaran saya tidak masuk kesitu, tetapi bagaimana agar dirasa kurang juga kurang dirasa cukup ternyata juga masih itu, tapi saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Menteri agar manajerialnya pengelolaan untuk penambahan tingkat menanam hutan reboisasi, penciptaan bibit, itu menjadi salah satu skala prioritas. Karena memang salah satu tupoksi utama adalah menjaga hutan yang sekitar 30m tidak tergerus kembali dan yang berikutnya adalah bagaimana untuk menanam, menanam dan menanam. Itu pemahaman saya terkait dengan tupoksi salah satu dari Kementerian Kehutanan.

Nah berikutnya Ibu Menteri terkait dengan RTW/RBW, saya kira kemarin dapat masukan dari Kepri ya. Ini menjadi pelajaran buat saya pribadi tentunya agar lebih hati-hati, ada yang mustinya yang wilayah yang mustinya dapat untuk masuk di wilayah sendiri-sendiri ternyata ada yang, yang tidak seharusnya mendapatkan masuk ternyata disetujui. Nah rekomendasi kami agar untuk RTW/RBP yang belum diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dibahas kembali untuk lebih hati-hati Ibu. Agar artinya apa, agar sesuatu yang kemarin mendapat keluhan dari masyarakat tidak terulang kembali. Jadi artinya ketika kami menerima itu sudah benar-benar yang sudah yang rigid udah dibahas secara detail, tingkat-tingkat kebocoran atau bolong-bolong yang mustinya tidak di, diapa namanya tidak disetujui, itu kami diberikan masukan ketika dalam rapat itu biar kita bisa disepakati bersama-sama. Barangkali itu Ibu Menteri yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi salah satu masukan yang buat kita bersama.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Merdeka!

Terima kasih Mas Rahmad Handoyo.

Selanjutnya kami persilakan Pak Hasanuddin. Siap-siap Ibu Endang Srikarti.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita berjumpa kembali dengan Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Pada saat ini

karena masih dibulan *Syawal* izinkan saya atas nama Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Komisi IV mengucapkan *Minal Aidin Wal Faidzin, Taqabalallahu Minnaa Wa Minkum Taqabbal Ya Karim*. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Mohon Maaf Lahir Dan Batin.

Pimpinan Yang Kami Hormati.

Kawan-Kawan Anggota DPR RI Komisi IV Yang Berbahagia.

Mitra Kerja Kami, Ibu Menteri Dan Jajarannya Yang Kami Banggakan.

Tentu apresiasi kepada Ibu Menteri dan jajarannya tetap mempertahankan WTP dan menjalankan tugas yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Tidak salah kalau kita tepuk tangan untuk Ibu Menteri dan jajarannya.

Ibu Menteri dan Pimpinan yang terhormat.

Pertama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menurut kami Anggota Komisi IV DPR RI sudah selayaknya Rancangan Undang-Undang ini sebelum berakhir masa jabatan kami di DPR RI Komisi IV ini sudah dapat diundangkan. Alasannya, pertama bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini, kalo kita melihat zaman sekarang ini atau kekinian, sungguh sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Dan ini sudah kita keliling ke beberapa Universitas, terakhir Wakil Ketua kita Pak Michael, waktu Wamena di Universitas Papua ya Pak, ya?

KETUA RAPAT:

Maksudnya mau direvisi, maksudnya? Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, itu mau direvisi maksudnya Pak?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Kan sudah ada rancangannya.

KETUA RAPAT:

Iya, maksudnya begitu kan?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Ya rancangan yang sudah kita keliling ke Universitas, saya terakhir di Palembang. Pak Michael di Papua. Sebelumnya kita di Aceh dan ini sudah bergulir terus. Kami berharap Pemerintah dan Anggota DPR tentunya membahas secara serius Rancangan Undang-Undang ini, supaya di akhir masa jabatan kita, RUU ini sudah menjadi Undang-Undang begitu Ketua, jadi Undang-Undang. Tinggal beberapa bulan lagi, kami minta keseriusan dari pihak Pemerintah untuk membahas ini dengan lembaga terkait. Karena keterkaitannya juga dengan Kementerian lain yang kami sudah baca rancangan ini dan sudah kami pelajari masukan-masukan dari masyarakat termasuk

masyarakat adat di Papua, masyarakat adat di Sumatera Barat dan di Aceh. Maka Undang-Undang ini sangat diperlukan, Rancangan Undang-Undang ini sangat diperlukan untuk Bangsa Indonesia, yang memang menjadikan hutan sebagai penyangga ekonomi mereka. Kalo Undang-Undang, rancangan ini di undang maka *stakeholder* dan masyarakat, karena kita sudah rubah beberapa Pasal, tentu masyarakat akan terbantu dengan adanya Undang-Undang ini, ini yang pertama. Sekali lagi saya sampaikan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun, kalo sekarang berarti bisa diundangkan berarti tahun 2019 pengganti atau perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Mohon menjadi perhatian Bu Menteri dan jajarannya, yang pertama.

Yang kedua, sebagaimana Mas Budi sampaikan perlunya hutan kota. Saya mengapresiasi Menteri Kehutanan dan jajarannya bahwa di lingkungan Kementerian Kehutanan ada taman rekreasi sebelah kiri yang dulu kami rancang dengan Pak Sumarto sebagai Kepala Biro Umum dengan Pak Sekjen. Itu taman olahraga sekaligus refleksi. Jadi ada tiga refleksi, batu-batu refleksi yang dulu kami rancang disana. Saya gak tahu sekarang apa itu masih dipertahankan, supaya Mas Budi jalan-jalannya jangan ke tengah kota lagi tapi cukup ke Kementerian Kehutanan disitu ada untuk *jogging*, ada juga untuk refleksi dan ada taman rekreasi lain. Itu bisa menjadi contoh sebetulnya bagi Kementerian lain. Nanti kami minta jawaban dari Pak Sekjen apakah itu masih dipertahankan?

Selanjutnya, disebelah kiri dari Kementerian Kehutanan itu ada pohon besar sekali, sangat besar sekali dan itu setelah kami teliti dengan Balitbang Bogor, di dalamnya sudah keropos. Jadi perlu diteliti kembali. Kalo memang itu keropos dan banyak mobil yang parkir disana dan kebetulan juga itu disamping ruangannya Ibu Menteri, kalo itu roboh, saya khawatir nanti Bu Menteri dan kawan-kawan bisa terjepit oleh kayu itu. Jadi kayunya sangat besar sekali. Ada beberapa orang yang menganggap itu kramat. Saya bilang, kok kramat sih, Sudahlah diteliti saja, kalo memang itu keropos dan itu membahayakan masyarakat dan penghuni gedung itu, termasuk Bapak-Bapak di dalamnya, teliti kembali dengan Balitbang.

KETUA RAPAT:

Kramat itu banyak hantunya maksudnya disitu?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Mungkin banyak hantunya kali disitu jadi ga berani Ibu Menteri dan Pak Sekjen dan kawan-kawan menebang itu. Ini perlu, ini perlu sikap arif dan bijak kita. Kalo yang lain-lain sudah di *pruning*. Kebetulan kami ikut sebagai pengawas waktu itu sudah di *pruning*. Jadi yang lain-lain sudah di *pruning*. Itu bagus sekali taman itu, sangat bagus sekali. Tepuk tangan dululah untuk

Kementerian Kehutanan. Itu bisa dicontoh oleh Kementerian lain, sungguh sangat bagus sekali. Ada buat *jogging*-nya, ada refleksinya, ada kolam ikannya untuk ikan yang bisa menyehatkan. Saya gak tahu apakah sekarang masih ada gitu. Jadi, kalo kaki kita masukan ke dalam itu bisa ikan itu mengambil jatah dia yang ada di kaki kita supaya kita sehat. Mudah-mudahan itu masih dipertahankan Bu Menteri.

Selanjutnya Bu Menteri, khusus di lingkungan Sekjen ada beberapa *lift* yang kurang bagus. Jadi mohon diperhatikan, jangan sampai orang terjebak di dalamnya. Ini kan ada anggaran untuk itu sekitar 500 Miliar. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, ini mungkin dana juga untuk kesetjenan mungkin. Saya rasa ini untuk kesetjenan. Jadi mohon diperhatikan di lingkungan Kementerian sendiri, *lift* ada beberapa yang rusak. Mohon dana ini dipergunakan untuk, untuk perbaikan *lift* dan juga perbaikan pendingin yang ada di Kementerian. Kenapa saya peduli dengan itu? Karena saya sering solat di Masjid sana, Masjidnya cukup bagus, indah sekali. Bagus kadang-kadang saya mampir ke sana dan mohon maaf sekali lagi, ini perbaikan untuk kita semua. Kalau kita masuk ke sebuah Kementerian tentu keamanan yang kita cari dan kenyamanan. Mohon bantuan Ibu Menteri dan Sekjen untuk diteliti kembali beberapa *lift* yang ada disana dan juga alat pendingin yang memang sudah tidak layak lagi, perlu diganti, diganti lah itu harapan kami sebagai masyarakat dan Anggota DPR RI kepada Ibu Menteri dan Pak Sekjen. Mohon maaf ya Bu Menteri ya, Pak Sekjen, mohon itu diperhatikan. Jadi kalo saya kesana lagi, *lift*-nya sudah bagus gitu maksudnya.

Pak Ketua Dan Kawan-Kawan Yang Berbahagia.

Saya sangat setuju dengan Mas Rahmad tentang WLU. Tapi kemarin kita sudah kaji disini dengan Perhutani dan Dirjen Pengelolaan apa Hutan Sosial, Perhutanan Sosial, Perhutanan Sosial. Ini mohon maaf sekali lagi Bu Menteri dan Pak Sekjen dan Kawan-kawan. Mohon dihitung kembali, mohon dihitung kembali secara rinci secara pasti tidak kira-kira, jangan kira-kira lagi. Satu hektar perhutanan sosial itu, kalo kita tanam minyak, daun kayu putih dua tahun baru menghasilkan, berapa si uangnya? Jangan kira-kira lagi, ini jangan kira-kira lagi. Sebab, kalo kira-kira lagi kemarin saya sudah bandingkan Bu Menteri. Kalo satu hektar tanam singkong, singkong itu cuma enam bulan, berarti kalo dua tahun sudah empat kali panen. Kalo empat kali panen, satu hektar itu 50 Juta. Berarti $4 \times 50 = 200$ Juta. Ini mohon maaf, ini teknis sebetulnya, tapi gapapa lah supaya nanti saya pulang ke Dapil saya bisa sampaikan. "Eh, jangan tanam singkong lagi, rubahlah dengan tanam kayu putih. Sehektar itu bisa menghasilkan 1 Miliar." Tentu mereka akan, akan beralih, beralih menanam kayu putih, ya Bu Menteri. Ini saya teknis, teknis sekali tapi gapapa lah, supaya jangan salah. Ya Pak Rahmad, ya? Pak Rahmad ini memang dulu pengelola UKM

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Siap-siap.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Saya ulang kembali, biar, biar ini masuk ke dalam pikiran yang jernih kita. Kalo kita menanam kayu putih, menggantikan tanaman lain. Satu hektar itu, berapa penghasilan bersih yang diterima oleh petani? Ini kan teknis Pak Ketua, tapi gapapa lah biar sekali-kali teknis kita bicarakan. Supaya, apa yang direncanakan oleh Bu Menteri dan kawan-kawan yang 1 Triliun, menurut Pak Ketua tadi masih impor, 1 Triliun masih impor. Bisa gak kawan-kawan perhutani dan Kementerian Kehutanan meyakinkan kita, kalo kita rubah cara bertani kawan-kawan di hutan sosial itu.

Karena hutan sosial tidak boleh ditanami sawit, begitu Bu ya? Gak boleh ditanami sawit. Kalo tidak boleh ditanam sawit, berarti kita tanam kayu putih. Kalo kita tanam kayu putih, kata orang Arab yang sudah di Indonesiakan pepatah ini, bisa kita terjemahkan ke dalam lingkungan kita di hutan sosial. Kata orang Arab yang sudah di Indonesiakan. *Kulu fullus mafi fullus mamfus*, Bahasa Indonesianya setiap orang menginginkan uang, kalo tidak ada uang agak sulit mereka bertindak atau bekerja. Jadi semuanya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya uang. Artinya ketika kita bersinergi dengan masyarakat, kehutanan yang ada di Dapil kita masing-masing, kalo kita rubah cara pola mereka bertani, kalo gagal yang pertama di maki yang dimarahi adalah kita yang sebagai pembawa usulan kepada mereka. Kalo mereka berhasil, hasilnya untuk mereka. Ini mohon dijawab secara rinci Bu Menteri dan kawan-kawan.

Ketua Dan Ibu Menteri Beserta Jajaran Yang Berbahagia.

Hak Pengusahaan Hutan atau HPH yang kita kenal selama ini yang diberikan kepada pengusaha jutaan hektar, tentu ada batasnya ya Bu Menteri ya? Ada batas tahun ya? Terjadi di Provinsi Jambi perbatasan Sumatra Barat, namanya Kabupaten Bangko. Itu banyak HPH yang sudah ditinggalkan oleh pengusaha. Pertanyaannya apakah karena sudah habis masa berlakunya? Atau kayunya sudah habis dan mereka tidak lagi disana? Ketika, lahan yang sudah di ambil kayunya oleh HPH, tidak ditanam kembali sebagaimana seharusnya. Tiba-tiba masyarakat disana menanam dengan pohon karet, dah gitu cakep sekali saya sudah kesana yang tadinya gundul, sekarang cakep sekali, indah, hijau, hijau karena karet. Saya pernah foto dan saya videokan nanti saya akan kasih ke Bu Menteri dan Pak Sekjen, kawan. Wuh, luar biasa bagusnya. Mereka bikin jalan sendiri, tanam sendiri, ga ada pengawasan dari Kementerian. Saya tanya, "siapa yang mengawasi? Ga ada yang mengawasi Pak, kita kerja sendiri aja." Tiba-tiba malapetaka datang. Datang malapetaka, mereka mau menyadap. Eh yang punya HPH datang, "eh ini tanah kami". Pak Ketua, coba Bapak Ketua bayangkan lima tahun mereka menggarap itu, tiba-

tiba datang saja pemilik HPH mereka menganggap, “ini kalian merampas tanah kami, ini HPH, hak milik kami. Kok kalian tanam?”. Pertanyaannya, kenapa ga waktu di tanam? Waktu mereka menggarap, kenapa sudah mau panen datang? Ini kan malapetaka untuk petani yang menanam. Mereka sudah hijaukan, tidak lagi terjadi longsor dan banjir. Harusnya kan kita memberikan apresiasi kepada mereka, bukan saja tepuk tangan untuk mereka tapi kita berikan hak mereka untuk mengelola lahan tersebut.

Oleh karena itu, pertanyaannya apakah perhutanan sosial bisa memberikan hak pakai kepada mereka selama 35 tahun itu? Sehingga mereka tidak lagi menjadi was-was. Menggarap tanah yang ditinggal oleh pengusaha HPH. Saya ulangi kembali, Bu Menteri. Apakah tanaman yang sudah lima tahun mereka tanam dan sekarang mau panen bisa dapat sertifikat atau surat hak pengelolaan hutan sosial selama 35 tahun itu? Kalo itu bisa, *Insy Allah* saya akan memfasilitasi itu dengan para petani dan para pemuka adat yang ada di Bangko, perbatasan antara Jambi dan Sumatra Barat. Sebagian tanahnya tanah Sumatra Barat, sebagian tanahnya tanah Provinsi Jambi. Mohon jadi catatan.

KETUA RAPAT:

Cukup? Masih?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Masih ada lagi.

KETUA RAPAT:

Waduh, iya dah.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, mumpung ketemu Bu Menteri lah ya, gapapa.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Jarang-jarang kita ketemu. Jarang-jarang kita ketemu sama Bu Menteri dan kawan-kawan.

Hutan kota, ini sudah menjadi buah bibir kita bersama, ada hutan kota. Oleh karena itu, jajaran Kementerian tentu bersinergi dengan Gubernur seluruh Indonesia untuk mewajibkan ada hutan kota. Dan *pilot project* yang saya sampaikan tadi itu boleh diberikan kepada Gubernur, bahwa kami di Kementerian Kehutanan sudah membuat itu di lingkungan kehutanan Kementerian Kehutanan. Mudah-mudahan ini bisa

kerjasama dengan seluruh Gubernur se-Indonesia dan boleh di foto atau di potret taman rekreasi yang ada di Kementerian Kehutanan.

Program pengelolaan sampah, limbah dan B3, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ini sejalan ada dana 600 Miliar. Saya usul kepada Dirjen yang terkait, berkerja sama dengan Bupati seluruh Indonesia untuk menanggulangi sampah bisa menjadi *bio energy* dan ini dari dulu tidak pernah selesai-selesai. Gak tau kendalanya dimana, apakah kendalanya di Kabupaten, di Kota atau kerja samanya dengan pihak ketiga yang gak mantep atau ada mafia lain yang sengaja tidak memberikan peluang ini. Karena di sampah ini banyak juga *dollar*-nya. Jadi di sampah banyak *dollar* juga. Ini mohon, Komisi IV dan Ibu Menteri termasuk jajarannya dimana kendalanya sih? Kok sampah yang ada di Kota-Kota itu tidak bisa dijadikan *bio energy*? Kalo ini dijadikan *bio energy* semua bisa terbantu. Listrik bisa terbantu, solar bisa terbantu dan yang terakhir sampah itu bisa dijadikan kompos, jadi pertanian juga bisa terbantu. Saya ulangi lagi, pertanian bisa terbantu dengan komposnya, masyarakat bisa terbantu dengan listriknya dan lingkungan bisa bersih. Kan ada tiga yang bisa di dapat oleh itu. Mau kami dari Anggota IV Komisi IV DPR RI dalam tahun ini juga sudah ada MoU dengan Kabupaten atau Provinsi dan pihak ketiga untuk menjadikan sampah sebagai energi.

Perhutani, karena Perhutani ada disini. Salah satu tupoksi Perhutani adalah taman rekreasi. Pak Perhutani ada gak ya? Ada ya. Oh ya, Pak Perhutani. Kemarin saya jalan-jalan ke Kawah Putih. Kawah Putih itu salah satu yang dikelola oleh Perhutani. Luar biasa bagusnya kawahnya. Airnya biru, kawahnya cukup mantap dijadikan rekreasi. Apakah Anggota Komisi IV sudah banyak bertandang kesana? Di Bandung adanya.

KETUA RAPAT:

Bapak gak ngajak soalnya.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Kawah Putih. Permintaannya, kelola lah secara profesional. Karena ini bagus. Karena sudah bayar, bayar tiket masuk ke dalam. Mohon diperhatikan. Orang enggan pergi ke rekreasi pertama kalo fasilitas di dalamnya tidak bagus. Toiletnya, tempat ibadahnya, parkirnya. Kalo sudah diminta uang 150.000/mobil ketika masuk, berarti termasuk parkir di dalamnya. Jangan diminta lagi parkir di dalam. Ini mohon maaf, mohon maaf sekali, kemarin saya tidak mengatakan saya Anggota Komisi IV, saya orang biasa saja. Jadi, sudah masuk bayar, di dalam di pungut lagi biaya parkir. Bukan masalah uang 5 Ribu atau 10 Ribu nya Bu Menteri dan kawan-kawan sekalian, ini budaya ini sudah harus di hapus. *No tipping* itu sebetulnya sudah harus dijalankan, sehingga orang rekreasi itu betul-betul *rileks* tidak lagi pusing dengan ini dan itu. Nah ini kan bentuk pelayanan kita kepada masyarakat. Itu satu contoh saja yang saya kemukakan tadi.

Mungkin banyak contoh-contoh lain yang bisa kita perdalam bersama. Saya ulangi kembali, tempat rekreasi coba lah kelola secara profesional karena ada anggarannya. Mohon maaf perbandingannya dengan luar negeri. Ini mohon maaf sekali. Kami pernah pergi ke Korea dan China dan Hongkong luar biasa tempat rekreasinya itu untuk menyedot masyarakat yang pergi kesana. Kenapa kita tidak pergi kesana.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf Bapak, mohon dibatasi waktunya. Yang lain belum.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Siap, siap Pak Ketua.

Ini demi Bu Menteri dan kawan-kawan supaya pertemuan ini.

KETUA RAPAT:

Ya, bisa *japri* Pak sama Bu Menteri nanti.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Dan masalah kehutanan dan lain-lain ini adalah masalah kita bersama.

Terakhir sebelum saya tutup, karena permintaan dari Pak Ketua.

Bu Menteri dan Kawan-Kawan yang Berbahagia.

Karena saya berasal dari Sumatera Barat yang *matriarkat* bukan *patriarkat* ini mohon maaf, ini pribadi jangan kawan-kawan lain tersinggung. Di Sumatera Barat itu tidak ada orang yang bisa memiliki tanah, karena dia turun menurun. Artinya, *matriarkat* ini seluruh tanah itu dimiliki oleh anak perempuan, tidak anak laki-laki. Tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan. Kecuali ada empat masalah. Pertama, kalo meninggal dunia. Yang kedua, kalau mau nikah. Yang ketiga, kalo ada persoalan adat yang dilanggar. Yang keempat, boleh digadaikan tidak boleh dijual kalau ada pelanggaran terhadap anak perempuan yang ada di Sumatera Barat. Selain dari itu tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan. Pertanyaannya, apakah hukum adat yang semacam ini di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah dibahas juga? Karena beberapa tanah yang dimiliki oleh adat sekarang, ada klaim dari pengusaha bahwa itu tanah mereka. Nah oleh karena itu, sekali lagi Bu Menteri. Mari bersama-sama masalah kehutanan ini secara rinci kita coba meruntut sehingga Rancangan Undang-Undang Tentang Kehutanan pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebelum kami berakhir jabatannya di Komisi IV ini diundangkan.

Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada gading yang tidak retak, diretaknya gading itu lah gading itu bisa mahal.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Kalo orang Sumatera Barat itu selalu berpantun. *Bulak hede pambuliah bulek kato dek mufakat.* Nah bisa juga gitu.

Selanjutnya, Ibu Endang Srikarti, siap-siap Ibu Kasriyah.

F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Pimpinan.

Sampai jam berapa ya Pimpinan? Supaya saya juga membatasi diri.

KETUA RAPAT:

Ya, di, dilihat aja waktunya Bu. Mau jam 4 boleh, jam 5 boleh, jam 7 boleh.

F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.):

Ya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Karena ini banyak sekali yang bertanya Bu Menteri. Mohon maaf ya dengan kesabarannya, gitu.

F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.):

Selamat Siang dan Salam Sejahtera.

Yang Saya Hormati Kementerian LHK dan Jajaran Dan Mitranya, dan

Yang Saya Banggakan Pimpinan dan Kawan-Kawan Komisi IV.

Saya Endang Srikarti Handayani dari Fraksi Golkar Dapil Boyolali, Klaten, Solo dan Sukurjo. Saya baca dan saya dengarkan tadi uraian Bu Menteri tentang anggaran 2019. Pagu 9,076 sekian dan realisasi 2,530 dan presentasi 27,38. Ini sudah lima bulan, separuh hampir separuh dari 12 bulan. Pertanyaan saya, terserapnya kenapa sedikit sekali? Mohon dijelaskan! Ketidakmampuan kah? Atau memang anggaran itu tidak bisa menyerap atau memang belum dilakukan penyerapan itu melalui baru lelang-lelang? Mohon dijelaskan.

Terus yang kedua, saya baca disini belanja pegawai 2,011 dan belanja oprasional 789,60 sekian dan belanja non oprasional 6,417. Ini totalnya ini kan lebih dari 12 hampir 15, padahal pagu untuk 2020, Bu Menteri ya ini ya? Ini kan mintanya hanya 9 koma sekian kalo ga salah ya, 9,219 itu pun sudah dengan Badan Restorasi Gambut ya? Apakah ada kesalahan? Atau saya yang baca kurang cerdas atau bagaimana? Karena disini tidak ada kesimpulan. Minta dukungan anggaran sekian totalnya.

Yang kedua, saya apresiasi KLHK tentang BPK mendapatkan WTP dengan catatan bahwa ini jujur. Itu sangat menggembirakan bahwa kami sebagai wakil rakyat yang ada di Komisi IV ini selalu bermitra, selalu berintegrasi dan sangat bangga bila tidak ada rekayasa. Selanjutnya adalah KLHK meminta dukungan kepada Komisi IV juga disini saya baca tentang program pengelolaan sampah, limbah dan sebagainya BP3. Mohon juga dijelaskan, karena aspirasi-aspirasi untuk Dapil untuk rakyat itu ada domain nya di Komisi VII. Mengapa demikian? Mohon dijelaskan Bu Menteri, karena Bu Dirjen waktu itu menyampaikan kepada saya "dukungan anggaran minta kepada Komisi IV, minta dukungan". Saya selama hampir dua tahun disini yang namanya untuk pengangkutan sampah, untuk rakyat juga tetapi ditolaknya sampai sekarang yang diharapkan oleh rakyat saya tidak pernah itu terjadi. Tolong dijelaskan yang komplit. Iya dong, Pak Pimpinan. Jangan kita memberikan kesimpulan, dukungan. Ini kita ikut tanggung jawab. Tolong dicatat itu. Ada apa?

Saya juga berterima kasih kepada Ibu Menteri dan jajarannya untuk membuat program. Program Pesona, Bank Pesona dan ABR/KBRI ya? KBR Tentunya tidak *ucuk-ucuk* memberikan, tetapi harus dilalui juga sosialisai sebelumnya. Jadi, biar tau kegunaannya ini adalah menyangkut anggaran atau uang jangan sampai, sampai di tempat rakyat yang sangat diharapkan oleh rakyat tetapi kegunaannya tidak tahu sama sekali. Jadi, mohon maaf tadi ada insiden sedikit. Dari rakyat ya, memesan kepada Bu titip pesan kepada Bu Menteri supaya selalu memperhatikan rakyat yang diujung sana, khususnya di Boyolali, Klaten, Solo, dan Sukoharjo. Mesennya adalah kehutanan ini kan dominan kayu jati tapi kok hilang ya Bu ya? Kayu jatinya kemana? Kebetulan beliau-beliau banyak sekali di luar negeri. Orang luar negeri itu bangga dengan jati Indonesia. Satu-satunya yang punya jati hanya Indonesia, tapi hilang. Tidak pernah itu dibicarakan. Termasuk hari ini, anggaran-anggaran tidak ada yang namanya untuk melestarikan yang namanya pohon jati, justru yang namanya kayu putih, saya bangga. Itu rakyat, ekonomi rakyat adanya disana, apa itu memang domain? Apa itu memang tupoksinya? Kayu putih itu di kehutanan? Saya tidak tahu kehutanan dan perkebunan. Ini ada berkaitan apa tidak, kalo kayu putih cocoknya di perkebunan kah atau di kehutanan kah? Atau memang ini sudah salah miring-miringnya? Saya tidak, tolong juga di jelaskan.

Saya rasa cukup, tidak terlalu melebar kemana-mana, saya juga malu kalo saya sampai ditegor sama Pimpinan. Saya mohon maaf, saya sebetulnya masih banyak sekali yang saya tanyakan, tetapi cukup lah. Saya apresiasi dengan program-programnya yang KBR dan Bank Pesona, supaya juga selalu pesona. Tebang dan tanam khususnya untuk dirumah-rumah perlu penghijauan tanpa uluran tangan, tanpa perhatian dari Kehut, Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup ya. Mereka tidak menata keasrian tetapi harus di barengi dengan sosialisasi karena itu ada anggaran. Sampai di penugasan, sampai di

bawah. Saya juga tanya, “apakah sosialisasi ini ada anggaran atau tidak? Tidak Bu. Tolong sampaikan kepada Bu Menteri.” Tolong juga jelaskan kepada kepada saya supaya saya sampaikan kepada masyarakat dan Dinas-Dinas terkait.

Terima kasih. Demikian saja, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Endang Srikarti.

Selanjutnya, kami persilakan Ibu Kasriyah. Siap-siap Bapak Dr. Hermanto. Ada Pak Hermanto?

F-PPP (Hj. KASRIYAH):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrohmanirrohim.

Juga saya, seperti Bapak-Bapak yang terdahulu dan Ibu menyampaikan selama masih suasana lebaran, *Minal Aidin Wal Faidzin*, Mohon Maaf Lahir Batin, Ibu. Kita cukup lama berkumpul di Komisi IV dan salah khilaf mohon dimaafkan.

Yang berikutnya juga mengapresiasi dari Kementerian LHK mendapat WTP, mudah-mudahan kedepan juga bisa dipertahankan, sukses selalu Ibu. Sudah banyak tadi yang disampaikan dan juga Ibu Menteri juga sudah memaparkan panjang lebar tentang program-program yang baik yang lalu yang sudah dilaksanakan 2019 dan lanjutannya tahun 2020 yang akan datang. Disini saya melihat ada program pergerakan DAS dan hutan lindung yang mana di tahun 2019 kemarin 3 Triliun lebih kelihatannya di 2020 ini agak menurun, hampir 1 Triliun saya ingin penjelasan. Karena menurut saya pengendalian DAS dan hutan lindung ini sangat, sangat juga diharapkan oleh masyarakat khususnya juga di Kalimantan Timur, Ibu dan hutan lindung disana cukup banyak dan ada. Kami kemarin dengan Pak Dirjen, Pak Winarto ya, pada saat kunjungan kerja ke Balikpapan kalo tidak salah dengan beliau, bahwa langsung dengan masyarakat yang ada di hutan lindung. Karena disana ada DAS, Ibu yang untuk pengendalian air. Disitu masyarakatnya cukup banyak, sudah mungkin puluhan tahun sudah tinggal disana, namun sampai sekarang jalan itu yang sangat masih berkaitan dengan aturan. Sementara, masyarakat yang disana itu juga yang menjaga hutan lindung itu, yang menjaga sungai DAS, sungai Ampal itu.

Sehingga, itu lah yang menjadi apa namanya masyarakat air PDAM yang ada disana, di kilometer 264. Jadi mungkin nanti seperti apa, masyarakat yang ada disana paling tidak bisa, yang sekarang hanya lewat sepeda motor Pak, yang tidak bisa untuk mobil dan jalan karena memang sudah aturannya. Tapi,

seperti apa nanti, untuk menjaga sungai DAS itu juga tapi hutan lindung juga tetap terjaga, saya kira begitu. Dan mungkin Ibu Menteri sudah, sudah teratasi mungkin yang lain, sehingga sampai turun mungkin ini tadi sampai 2 Triliun lebih saja. Ini mohon penjelasan Ibu Menteri.

Yang berikutnya, tentang program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Berapa hari yang lalu kita ada pertemuan dengan (suara tidak jelas) Perhutani dan memang Kalimantan Timur luas sekali. Ada lah tanah oleh Perhutani yang kemarin programnya (suara tidak jelas) Menanam Kayu Putih, kalo saya sangat mengapresiasi itu, karena mungkin bisa menimbulkan, bisa menambahkan perekonomian masyarakat kita yang untuk menambah ekonomi kedepan. Sehingga masyarakat bisa menambah pekerjaan karena dua tahun saja itu sudah bisa panen, saya kira bisa untuk menambah kesejahteraan bagi masyarakat kita yang berminat nanti yang di dalam hutan atau di dalam lahan Perhutani, khususnya di Kalimantan Timur.

Yang berikutnya Ibu Menteri, program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ini ada kenaikan. Saya juga sangat *men-support*, karena memang namanya program penegakan hukum di lingkungan ini se Indonesia tidak sedikit. Apalagi khusus beberapa kali kejadian khususnya di Kalimantan Timur, tumpahan minyak, kejadian kapal yang sampai sekarang masih ada Pak masyarakat yang untuk yang belum lagi terselesaikan. Nah untuk itu mungkin, sedikit nanti penjelasan karena kepada siapa dia mengadu, ya saya menyampaikan, karena di Komisi IV lah yang membidangi.

Jadi mudah-mudahan dengan tumpahan kapalnya, kejadian yang lalu itu masih ada masyarakat-masyarakat yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan saya dapat sedikit informasi dan saya sangat *men-support* bahwa ada kenaikan sedikit, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Karena permasalahan masalah, apa namanya hukum di lingkungan hidup dan kehutanan ini tidak sedikit untuk di (suara tidak jelas) khususnya di Balikpapan. Pertamina itu Pak masih saja kalo membuang lantungnya itu kadang-kadang masyarakat teriak. Karena sayang, kita memelihara mangrove, memelihara mangrove sementara ada yang membuang limbah-limbah yang merusak mangrove.

Saya kira ini saja yang saya dapat sampaikan, terima kasih Pimpinan.

Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bu Karsiyah.

Kami persilakan Pak Hermanto. Waktu lima menit maksimum sepuluh menit. Ya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Saya senang dengan Pak Ketua, kalo saya dibatas-batasi kita jadi lebih cepat lebih baik.

KETUA RAPAT:

Siap-siap Pak Irwan Zulfikar ya

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan.

Anggota, dan

Bu Menteri Bersama Jajaran.

Bu Menteri, pertama kami menyampaikan, *Minal Aidin Wal Faidzin*, Mohon Maaf Lahir Batin. *Taqobalallahu Minna Wa Minkum Taqabbal Ya Kariim.*

Selanjutnya, kami ingin menyampaikan, saat ini kita masa transisi anggaran dari rezim Pemerintahan sekarang dan ke rezim Pemerintahan masa yang akan datang. Saya ingin menyampaikan kepada Bu Menteri bersama jajarannya, karena ini adalah masa yang sangat bagus untuk Kementerian untuk mengagendakan program-program dan kegiatan-kegiatan selama periode yang akan datang. Saya minta supaya Bu Menteri bersama jajarannya merancang sebuah perencanaan komperhensif untuk pembangunan kehutanan dan lingkungan Indonesia pada periode-periode yang akan datang.

Karena dengan perencanaan komperhensif ini, kita berharap ini adalah menjadi inti *lock* kita, titik tolak kita ya, untuk apa yang akan kita kerjakan dan juga dianggap sebagai suatu parameter dianggap sebagai suatu ukuran, kemajuan-kemajuan disektor pembagunan kehutanan dan lingkungan, sehingga jelas arah kita apa. Di dalam perencanaan komperhensif itu tentunya kita ingin mendapatkan suatu gambaran, strategi apa yang akan disusun untuk yang akan datang, kemudian program dan kegiatannya. Sehingga kita betul-betul serius untuk membangun sektor kehutanan dan lingkungan ini. Nah tentunya ini kita berbasis kepada *constraint* yang kita hadapai. *Constraint* itu adalah ketersediaan anggaran, ketersediaan SDM dan ketersediaan faktor pendukung yang lainnya. Nah dalam lingkup ini lah kita ingin menyusun satu tunjangan komperhensif dengan keterbatasan itu kita ingin pekerjaan kita ini optimal. Supaya kita berharap, apa yang kita capai ya hari ini itu bisa tumbuh berkembang jauh lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Oleh karena itu, di dalam perjalanan ini saya minta supaya visi-misi perencanaan kita nanti itu adalah menghindari, menghindari ada orang yang terlalu kaya dan perkasa di

sektor kehutanan dan ada orang yang terlalu miskin. Sementara dia berada di hidup di hutan itu.

Nah ini, patut Ibu Menteri, supaya menjaga keseimbangannya. Supaya jangan terjadi ketimpangan, kesenjangan yang terlalu jauh antara korporasi yang sebenarnya dia tidak berada di lingkungan itu dan dia hanya ingin mengeruk keuntungan-keuntungan dari sektor itu. Sementara petani atau pegiat hutan yang sebenarnya hidupnya dan mengolah satu-satunya sumber hidupnya adalah dari hutan. Dan ini di beberapa tempat ada masyarakat yang di kejar-kejar oleh polisi hutan. Karena hanya sekedar untuk mencari kehidupan kebutuhan sehari-hari. Tapi disisi lain, kita menyaksikan adanya *illegal logging*. *Illegal logging* ini saya minta nanti Bu Menteri betul-betul serius memetakan. Karena ini adalah yang menimbulkan adanya orang terlalu kaya dan mengakibatkan orang terlalu miskin. Saya setuju apa yang disampaikan Bu Endang tadi dan juga Bu Karsiyah. Itu adalah betul-betul dari hati nurani rakyat dan petani hutan. Hati perasaan ya.

Nah ini menurut saya nantinya ini, saya barusan men-*searching*, Bu. Ada saya *searching* itu *illegal logging*, Itu keluar semuanya. Kegiatan *illegal logging* ada di Aceh, di Sumut, di Sumatera Barat, di Jambi, hampir di seluruh Sumatera termasuk Jawa yang dipetakan Bu Endang tadi. Di Cepu itu ada juga *illegal logging* terkait dengan kayu jati. Kemudian juga di Kalimantan yang diceritakan oleh Bu Karsiyah, yang sampai dampak lingkungan hut laut ya kan, itu bukan hanya hutan tapi laut juga Bu, luar biasa. Termasuk juga nanti diceritakan oleh Bapak Hasanuddin dari Sumatera Barat ini. Keperhatian beliau ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Nah, saya minta ini semuanya di rangkum menjadi satu visi-misi yang kuat dan kokoh untuk Kementerian Kehutanan. Nah oleh karena itu, Bu Menteri, program-program yang disusun nanti itu betul-betul memberantas kemiskinan. Oleh karena itu ada program yang bersifat mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat, betul-betul kami dukung ya. Di situ ada program bibit produktif, ada DAS, ada juga ke perhutanan sosial, ada hutan masyarakat hukum adat segala macamnya.

Nah itu kalau itu porsinya kita optimalkan ya kan itu saya, ini program ini betul-betul bisa me memberantas, cuma skalanya nanti harus diperluas gitu jadi porsinya atau piramidanya harus dirubah ya. Jadi jangan terlalu besar kepada untuk kepentingan para pengusaha. Dan Ibu Menteri juga perlu mendata perusahaan-perusahaan besar yang memiliki dan menguasai hutan yang luas itu. Sehingga tahu perimbangannya kaya apa, sehingga Bu Menteri nanti bisa menjagakan *balancing* nya kaya apa gitu loh. Sehingga masyarakat kita ini betul-betul ya hidup di hutan itu diuntungkan dengan kebijakan ini ya. Nah ini sangat penting Bu Menteri kami minta nanti ini betul-betul tercantum ya dalam agenda besar Kementerian Kehutanan. Saya tidak menyebut rinci-rincinya seperti apa di daerah-daerah tapi ini adalah aspirasi semuanya ya.

Dan tentunya kami memberi apresiasi yang luar biasa kepada Bu Menteri di mana Kementerian sudah mendapatkan WTP ya, tiga kali berturut-turut ini sangat jarang juga ya. Nah tentunya ini Bapak/Ibu ini kerja sama kita, antara Kementerian dengan Komisi ini perlu dibangun sedemikian rupa sehingga betul-betul mitra yang efektif dibangun kehutanan ini. Nah terkait juga dengan agenda ada juga tadi lingkungan ya yang sebenarnya lingkungan ini kan lebih banyak dibahas di Komisi VII ya kan, nah di komisi IV ini kan lebih banyak pada porsi kehutanan. Tapi setidaknya-tidaknya karena ini adalah satu kementerian dengan dua bidang ini kami juga Komisi IV juga bisa sup masuk kepada persoalan lingkungan, terutama kebersihan terkait dengan pengolahan sampah yang disebutkan oleh Bapak Hasanuddin tadi ya.

Nah di beberapa tempat itu sungai-sungai itu, itu ini mungkin program kesadaran terhadap lingkungan Bu Menteri ya. Ini mohon ditingkatkan karena kita menyaksikan sungai-sungai kita itu banyak sekali sampah, sampahnya itu adalah sampah kimia gitu ada plastik, ada sampah sabun, ada sampah macam-macam botol yang tidak bisa dan itu bermuara ke muara laut gitu. Dan numpuk di situ dan juga merusak seluruh sistem kehidupan di situ, ikan-ikan hidup yang di situ juga tidak layak untuk dimakan. Nah ini ada aspirasi dari masyarakat Sumatera Barat, supaya membuatkan sebuah agenda program bersih lingkungan di aliran sungai ya. Bersih lingkungan karena itu ujungnya nanti ke muara, jadi muara itu jadi kotor. Nah apakah bentuknya seperti apa itu kami serahkan kepada Bu Menteri, karena ini juga kita punya tanggung jawab bersama terhadap kebersihan sungai.

Demikian Pak Ketua.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA:

Terima kasih Pak Hermanto, persis sepuluh kurang setengah menit, luar biasa. Kami persilakan Pak Hasanuddin, terakhir mungkin nanti akan disusul oleh Pimpinan. Masih ada Anggota yang lain? Ya? Eh Pak Irwan? Bukan Pak Hasanudin, Pak Irwan ya. Terima kasih. Sebelum ke situ Pak Fadholi? Terima kasih.

F-PAN (M. IRWAN ZULFIKAR, M.B.A.)

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA:

Lima atau maksimal 10 menit.

F-PAN (M. IRWAN ZULFIKAR, M.B.A.)

Siap, betul ya.

Pimpinan Yang Saya Hormati.

Ibu Menteri Serta Jajarannya Yang Saya Banggakan.

Saya cuma ingin mengingatkan Ibu Menteri bahwa sekitar bulan Januari tepatnya 21, 22 Januari lalu ada musibah yang menimpa Sulawesi Selatan. Karena ini meliputi Dapil Sulsel I dan Dapil Sulsel II Bu Menteri, di mana pada saat itu banjir bandang memakan korban sekitar 79 orang yang meninggal, sekitar 22.000 rumah yang terendam dan pengungsinya tidak kurang dari 9.000 lebih, ini akibat daripada longsoran dinding kawah Gunung Bawakaraeng. Yang mana pada saat itu banyak membawa material dan merusak daya lara, daya aliran sungai juga termasuk Bendungan Bili Bili. Sekedar informasi bahwa Bendungan Bili Bili ini yang mengairi PDAM kota Makassar dan ternyata endapan dari longsoran dinding kawah Gunung Bawakaraeng yang terjadi pada tahun 2004 itu ternyata kemudian menjadi bom waktu di Januari 2019 lalu. Dan sebagai informasi bahwa saat ini sekitar 112 juta kubik itu mengendap di Bendungan Bili Bili. Yang artinya sama dengan sepertiga dari daya tampung air Bili Bili tersebut. Yang saya khawatirkan Bu Menteri bahwa ini kemudian menjadi bom waktu entah kapan kalau ini bendungan jebol ini akan merendam, akan memakan korban lebih banyak lagi khususnya Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Saya sangat berharap bahwa pada Tahun Anggaran 2020 nanti ini bisa diberikan perhatian yang ekstra supaya tidak memakan korban lebih banyak ke depannya Bu Menteri.

Yang kedua saya juga ingin memberikan catatan bahwa banyaknya alih fungsi lahan di sekitaran DAS Jeneberang ini, sehingga saya sangat berharap bahwa bagaimana pihak Gakkum, KLHK untuk mencoba melakukan pendekatan ataupun kepada masyarakat di sekitar DAS untuk meningkatkan kesadarannya terhadap ancaman yang akan menimpa ke depannya. Saya pikir itu saja Pimpinan, gak cukup lima menit. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA:

Terima kasih Pak Hasanuddin, saya hitung hanya empat menit tapi pertanyaannya berbobot. Luar biasa.

Kami persilakan Pak Fadholi siap-siap, masih dari Anggota masih ada? Pak ya, siap-siap Pak ya ya. Terima kasih. Saya persilakan mudah-mudahan Pak Fadholi juga tidak kalah dengan Pak Hasanuddin empat menit. Saya kasih waktu lima menit, bonus lima menit.

F-NasDem (Drs. FADHOLI)

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Ibu Menteri Dan Seluruh Jajaran Yang Saya Hormati.

Bapak Ketua Dan Bapak/Ibu Anggota Komisi IV Yang Saya Hormati.

Memberikan satu penghargaan apa yang selama ini telah dicapai oleh Bu Menteri satu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Dan pada rapat kali ini kita fokus pada pembahasan anggaran, pada prinsipnya saya sepeham dan setuju apa yang diajukan Bu Menteri dari pagu indikatif untuk tahun 2020. Dan sekalipun ini sebetulnya masih, masih perlu penambahan daripada pagu itu. Jadi kalau memungkinkan masih ada celah-celah untuk bisa ditambah saya pikir itu masih ditambah masih lebih bagus lagi itu. Karena banyak sekali program-program yang memang mesti harus diselesaikan dengan baik.

Yang kedua saya juga menyampaikan bahwa konsentrasi program konservasi sumber daya alam dan ekosistem ini sangat perlu ditingkatkan lagi karena ini menjadi salah satu program andalan daripada Kementerian Kehutanan. Dan juga pada program pengendalian DAS dan hutan lindung, ini untuk program-program ini saya sangat setuju dan ini menjadi bagian yang sangat penting sekali. Karena salah satu, salah satu apa yang menjadi andalan bahwa program kehutanan itu ada dipengendalian DAS dan hutan lindung. Nah terkait dengan pengendalian DAS dan hutan lindung ini, maka saya minta bahwa ada beberapa daerah ini untuk penataan aliran sungai itu menjadi satu hal yang sangat penting. Berikutnya adalah juga perlu peningkatan kawasan dilindungi hutan, jadi LMDH itu sangat penting sekali untuk memberikan infrastruktur ya, jadi masih terutama termasuk di daerah saya ini masih banyak ada beberapa yang belum perhatian memberikan *support*, sekalipun tentu saya sampaikan terima kasih terhadap adanya perhutanan sosial, tapi ternyata mereka juga masih memerlukan infrastruktur yang di, di diharapkan agar bisa mendukung itu.

Dan juga dalam rangka untuk bisa menjaga kesejahteraan masyarakat dilindungi dan hutan ini, ada beberapa daerah yang mungkin berdekatan pada hutan lindung, berdekatan dengan hutan dan termasuk kita memperhatikan agar para petani di lingkungan hutan ini, bisa mendapatkan sebagaimana yang diharapkan tadi sudah dipaparkan untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih ya.

Salah satu kendala yang dialami di beberapa daerah itu juga bagaimana agar ini terjadi juga Pak yang masalah, saya akan tanya aja program penanganan kera ya? Program penanganan kera ini ya karena ada beberapa daerah itu hutannya itu banyak ditanami pinus, ditanami yang lain-lain akhirnya ada juga kera-kera itu masuk desa ya. Ini juga bagian, kemarin di wilayah saya sudah diatasi dan *alhamdulillah* terima kasih dan dari kehutanan sudah datang langsung ke wilayah saya dan sekarang sudah mulai jera keranya itu. Cuma teknik untuk bisa menjinakkan kera ini bagaimana kan kita ini mungkin dari KSDA itu bisalah tahu secara persis. Tetapi ini belum menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa menjaga kelestarian alam.

Berikutnya saya sampaikan bahwa program tanam, tanaman ini buah-buah produktif dan lainnya ini sa, masih sangat diperlukan ya. Nah untuk itu program tanam kembali ini agar tetap bisa dilestarikan, bahkan kalau perlu itu agak ada satu tambahan yang lebih. Karena dengan menanam terus jadi ini ternyata memang sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat. Malah sangat merasa terbantu dengan diberikan bibit-bibit buah produktif, tanaman keras, ini masyarakat merasa terima kasih sangat terbantu dan itu masih sangat dibutuhkan. Dengan terus menanam maka akan menjadi lestari dan asri wilayah kita, karena memang sekarang ini petani sudah mulai enggak gak sempat, gak (suara tidak jelas) untuk bisa *deder* atau membibit itukan (suara tidak jelas) sendiri itu udah gak (suara tidak jelas) tapi kalau itu tetap disediakan tuh sangat bagus sekali. Demikan jadi pada kesimpulan ini, pada prinsipnya apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Menteri pada prinsipnya kami mendukung sepenuhnya.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA:

Terima kasih, persis lima menit.

Sebelum ke Pak, saya kira ingin saya menawarkan karena sekarang sudah menginjak pukul 13.30 apakah kita rehat dulu untuk memberikan kesempatan sholat atau sambil makan siang, atau kita teruskan dengan catatan kita perpendek perdebatan ini penjelasan, karena penjelasan ini kita masih ada waktu untuk pendalaman. Yang seharusnya kita ini sekarang menerima penjelasan dari para Menteri dan jajarannya, nanti ada jadwal pendalaman yang sedalam-dalamnya nanti ya dengan para namanya RDP.

Jadi saya kira kalau memang ada masih ada pertanyaan kita teruskan tapi sesingkat-singkatnya minimal kita sampai jam 2 selesai kesimpulan. Saya ini hanya menawarkan.

F-PPP (ANGGOTA):

Maaf Ketua, kalau saya dar Fraksi PPP tinggal berdua, rehat dulu Pak, sholat dulu rehat. Jadi nanti enak kita bicara sama Bu Menteri.

WAKIL KETUA:

Ya, ya, ya dari tempat, dari Fraksi lain bagaimana? Kita teruskan? Ya?

F-PKS (ANGGOTA):

Pak, ini kan karena sampai jam 2 batasnya ya Pak ya. Saya setuju dilangsung aja kesimpulan nanti ada pembahasan berikutnya.

WAKIL KETUA:

Ya dari PKS, dari, dari Golkar bagaimana? Tapi dengan catatan pendek-pendek saja, jangan panjang-panjang ya. Karena nanti panjang-panjang dipendalaman, nanti akan kita panjangnya nanti kita bikin di hotel ya. Sampai pagi, sampai pagi lagi ya.

F-PG (ANGGOTA):

Pimpinan. Pimpinan, dari Fraksi Golkar, dari fraksi Golkar. Ringkas padat dan jelas itu *sing* penting gak usah *bundet* aja. Waktu itu kan berharga dan Bu Menteri pun juga tidak hanya di Komisi IV. Demikian.

WAKIL KETUA:

Jadi kesimpulannya?

ANGGOTA:

Izin, interupsi Pimpinan.

Saya rasa tadi ada beberapa hal yang ingin kami dengar sebagai tanggapan dari Bu Menteri, mungkin nanti bisa disisihkan waktu sedikit saja Bu Menteri bisa ngasih penjelasan singkat atas pertanyaan yang sudah di kemukakan.

Terima kasih.

WAKIL KETUA:

Jadi kalau begitu, dengan kesepakatan kita bersama kita akhiri sampai jam 2. Kita teruskan kalau masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu silakan, tapi dengan tepat terukur ya dan jelas ya. Jam 2 kita selesaikan saya beri waktu sampai jam 5, 15 menit pertanyaan kemudian jam 15, 15 menit penjelasan Pak, Ibu Menteri. Kemudian kita kesimpulan habis itu kita sholat, makan siang, pulang ke ruangan masing-masing. Gitu ya? Boleh ya? Ya terima kasih. Kalau begitu diteruskan kepada.

ANGGOTA:

Izin, izin, izin Ketua. Saya mau menyerahkan ini sebentar ke Bu Menteri.

WAKIL KETUA:

Nah kalau itu boleh, satu menit kan ya. Gak masalah, silakan. Foto foto?

ANGGOTA:

Foto, foto, penting itu, dokumen negara Ketua.

WAKIL KETUA:

Mana? penting nih, ini dokumen negara ini. Pak Hasanuddin? Ya cuma setengah menit Pak Hasanuddin. Mari kita lanjutkan, saya persilakan.

F-NasDem (H. SULAEMAN L. HAMZAH)

Baik, terima kasih Pimpinan. Dua menit Pak singkat saja.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Dan Seluruh Anggota Komisi IV Yang Saya Hormati.

Bu Menteri, Para Eselon I Dan Seluruh Jajaran Yang Saya Hormati.

Pertama tentunya masih dalam suasana Idul Fitri saya menyampaikan Mohon Maaf Lahir dan Batin kepada kita semua, mudah-mudahan kinerja kita selama ini ada salah dan khilaf sama-sama kita saling memafkan.

Bu Menteri saya ingin menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu kita baru saja mendapat musibah di Dapil saya di Jayapura, tepatnya di Danau Sentani. Itu ada musibah besar yang menapa, banyak korban jiwa yang didalamnya tentu ada banyak harta benda juga yang terkubur di danau. Ada lima sungai kecil yang bermuara didanau yang itu menjadi penyebab pertama dan yang kedua di atas gunung itu ada seperti danau kecil yang menampung air, kemudian sangat mudah kalau curah hujannya tinggi itu berarti membahayakan di wilayah di bawahnya. Nah terkait dengan kerusakan yang akibat dari DAM apa banjir yang kemudian sampai ke wilayah danau dan diwilayah danau sendiri juga terendam karena airnya naik. Ini semua lingkungan di sekitar situ sudah memang sekarang sudah dikatakan sudah membaik, sudah pulih, airpun sudah turun, tetapi bagaimanapun pemulihan pasca banjir ini perlu dilakukan secara serius. Karena struktur tanah yang ada diwilayah situ ternyata memang berpasir, dan sangat mudah kalau diterjang banjir itu seluruh material akan jatuh ke wilayah danau. Itu yang saya ingin sampaikan barangkali Bu Menteri bisa menjelaskan ini, agar kita dalam diskusi lanjutan tentang pemulihan lokasi ini bisa kita jawab di wilayahnya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

WAKIL KETUA:

Terima kasih Pak Sulaeman.

Sekarang giliran di meja Pimpinan, saya persilakan Pak Daniel.

WAKIL KETUA/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Ya terima kasih.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang Pimpinan dan Segenap Anggota.

Bu Menteri dan Seluruh Jajaran.

Ada beberapa hal yang mungkin penting. Yang pertama Bu Menteri, kita minta di *update* ya sekaligus mungkin ketegasan dari Kementerian LHK terkait reklamasi di DKI ya, yang belakangan mendadak muncul IMB ya. Karena seharusnya IMB itu muncul berdasarkan ada rencana zonasi yang Perda apa, yang jelas meskipun *domain* terkait pesisir itu ada di KKP, tetapi terkait dengan masalah AMDAL dan rencana tata ruang zonasi itu ada di KLHK, sehingga sejauh mana ya perkembangan yang ada?

Yang kedua adalah, saya mau terima kasih Bu sudah membantu apa, pemadam di Kalbar. Mudah-mudahan itu bisa, nih bulan depan atau dua bulan berikut ramalannya akan banyak ini, titik panas ya. Dan mudah-mudahan itu dapat membantu, tetapi kita juga berharap tahun ini juga akan kita lalui dengan baik seperti tahun-tahun yang lalu ya, menghadapi kemarau yang panjang.

Berikutnya, nah saya itu mendapat di KLHK itu pernah punya program menanam pohon Kratom, namanya Kratom. Nah tetapi Kratom ini menjadi masalah sekarang ini karena dianggap Kratom itu mengandung psikotropika. Nah saya minta, sementara literatur, literatur yang sempat saya baca malah pohon Kratom itu menjadi obat yang sangat efektif untuk menyembuhkan para pecandu Bu, selain penyakit lain. Artinya, melalui KLHK Kehutanan kita berharap Pemerintah Indonesia jangan mengambil kebijakan yang tahu-tahu mendadak melarang tanpa kajian yang dalam dan *final* gitu. Karena itu sebenarnya sama saja merugikan kita nih. Ini harta, harta Indonesia ya yang bisa menambah pendapatan dan macam-macam kesejahteraan, kita rusak sendiri tapi pada akhirnya nanti kita impor Bu. Yang kita impor adalah sudah hasil olahan. Nah bayangkan Bu, pertama pohon Kratom tidak perlu pupuk sama sekali. Ditanam, dan ditebang gak perlu ditanam baru dia akan tumbuh lagi ya. Nah per hektar, per hektar itu kalau kita menanam Kratom seribu pohon, itu panennya itu per hektar 66 juta per hektar per bulan. Gak ada apa-apanya dibandingkan Sawit. Sawit per hektar hanya 6,5 juta, tapi musti pupuk kan? Jadi net nya itu Sawit per hektar hanya 3 juta dibandingkan Karet. Karet pun sama, 1 hektar per bulan hanya 3 juta. Nah Kratom itu bisa menghasilkan 66 juta per hektar.

Nah sebagai bayangan, hanya Amerika itu mereka butuh 13 ribu ton Bu per bulan. 13 ribu ton itu nilainya 429 Miliar per bulan, berarti per tahun itu 6 Triliun. Itu yang kita jual adalah bahan baku, daun nya doang. Yang diambil nih daunnya doang Bu. Kalau kita kelola menjadi serbuk, itu berubah harganya per kilo 25USD per kilo. Berarti dengan 13 ribu ton per bulan yang dibutuhkan, kalau kita jualnya dalam bentuk serbuk, itu devisa yang kita dapat adalah 51,8 Triliun

per tahun. Nah untuk menghasilkan 13 ribu ton per bulan ini kita butuh 6,5 juta pohon Kratom, gitu. Tetapi mungkin memang dia cocok di daerah seperti di Kalbar yang pinggir sungai Bu. Nah untuk 6,5 juta pohon Kratom, Sungai Kapuas itu panjangnya 1 juta meter Bu. Jadi kalau setiap titik kita ke dalam tiga pohon, nah itu dalam konteks kehutanan sangat membantu karena Kratom bisa menghasilkan oksigen dan macam-macam ya.

Nah jadi saya minta, mendorong KLHK berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan terutama termasuk karantina, benar ya? Karena sekarang ekspor kita terhenti nih, dan itu merugikan masyarakat yang punya Kratom dengan nilai yang segitu tinggi. Dan terutama berkoordinasi dengan BNN Bu, jadi yang ada pelarangan di BNN ya. Padahal kalau misalkan ini bisa meningkatkan devisa 51 Triliun per tahun, yang kedua tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Tapi yang paling penting adalah kalau dengan penelitian yang dalam, ini sumbangan Indonesia terhadap dunia kesehatan. Apa yang bisa disumbangkan Kratom untuk kesehatan dunia Bu. Saya merasa *feeling* saya, ini kerjanya mafia obat, mafia obat yang membuat kita mem-*banned* mengambil harta kita sendiri pada akhirnya mereka sendiri yang jualan, yang kita beli sudah produk jadi ya.

Nah terakhir, tentu ini juga yakin mewakili seluruh sahabat di Komisi IV. Program Bank Pesona dan Bibit Produktif, wah ini termasuk paling top lah di Komisi IV. Kita berharap bisa diperbanyak untuk tahun depan karena selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga bisa membantu mengatasi banjir dan tanah longsor itu. Mungkin itu. Sekali lagi apresiasi terhadap kinerja dari Kementerian KLHK.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA:

Terima kasih.

Sebelum ke Pak Michael, masih ada yang angkat tangan? Karena agak terlambat saya kasih dua menit boleh ya? Ya silakan.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Ya, karena di kasih dua menit saya singkat saja. Bu Menteri, saya ada tiga hal yang saya sampaikan. Yang pertama, ini terkait dengan normalisasi sungai yang ada di Desa Pemogan Bu. Disana sudah delapan tahun ini setiap tahun itu kena banjir Bu. Nah ini disebabkan karena perlu diadakan normalisasi atas sungai yang ada di Pemogan itu. Yang tadinya di areal itu dikelola menjadi tambak yang kemudian diambil alih oleh Pemerintah Daerah dijadikan hutan bakau yang kemudian dialur sungai itu tumbuh bakau-bakau liar, yang

kemudian menghambat jalannya air menuju laut lepas. Nah itu yang sekarang setiap tahun tiga banjir di desa itu teredam banjir Bu. Itu yang pertama.

Yang kedua, ditempat itu karena menjadi buangan sampah atau dapat kiriman sampah, masyarakat sekarang sudah menemukan dua mesin Bu. Nah saya undang Ibu untuk melihat mesin itu. Itu mesin pemecah sampah plastik dan kaca, yang kemudian mesin itu bisa menjadikan sampah plastik itu menjadi minyak. Nah tinggal kita *check* residunya berapa. Ini baru seminggu Bu, jadi. Nah inilah bentuk apresiasi masyarakat mengantisipasi banjir yang setiap tahun itu.

Terus yang ketiga, saya juga mohon bantuan Ibu karena sudah empat tahun ini, kami dengan masyarakat pecinta lingkungan dalam katanya melestarikan burung hantu dan juga membantu petani dari wabah tikus. Jadi sudah siap nanti Ibu saya ajak melihat secara dekat, bagaimana kegiatan kita melestarikan burung hantu. Setiap malam kita berburu tikus untuk kasih anak-anak burung hantu yang kemudian mengambil anak burung hantu yang menetas telurnya dikandang yang kita siapkan yang kemudian kita pelihara. Setelah siap berburu tikus barulah kita lepas ke lahan pertanian. Nah sekarang sudah siap Ibu, burung yang kita lepas, yang siap lepas nanti Ibu saya mohon untuk memberikan semangat kepada pecinta lingkungan ini, saja ajak Ibu melepas burung hantu di Kabupaten Tabanan. Itu tiga hal.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Burungnya berapa banyak Pak?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Sudah ada empat belas pasang Bu. Pak Direktur pesan ke saya 21 sampai saat ini. Pak Dirjen juga sering info ke saya, kalau dalam bulan ini baru siap empat belas ekor. Jadi siap dilepas, nanti Ibu tinggal atur waktunya. Saya yang membuat kegiatan untuk Ibu di Bali.

Sekian, terima kasih.

WAKIL KETUA:

Alhamdulillah kita bisa ketambahan lagi aset burung hantu di Bali. Saya persilakan Pak Michael.

WAKIL KETUA/F-PD (Dr. MICHAEL WATTIMENA SE., M.M.):

Terima kasih Pak Roem.

Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Yang Kami Hormati.

Jujur harus saya katakan Ibu Menteri, selama saya ada di Komisi IV, hari ini saya melihat Ibu Menteri agak lelah sekali, mungkin karena *over* kerja. Maka teman-teman izinkan saya menyanyikan sebuah lagu untuk Ibu Menteri tapi

tidak banyak. “*Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, kisah mahabrata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajah dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara*”.

Ya mungkin cukup itu saja lagu yang saya nyanyikan kepada Ibu Menteri karena memang jujur saya lihat Ibu agak sedikit capek. Tetapi dibalik kecapekan daripada Ibu Menteri beserta jajaran, ada hasil yang didapatkan. Dimana pada tahun 2017, 2018 Ibu mendapatkan predikat WTP. Dan melihat daripada kelelahan Ibu hari ini, maka kami yakin bahwa Ibu akan ciptakan *hattrick* di akhir tahun 2019. Ya itu juga pasti akan mendapatkan WTP. Biasanya kalau tiga kali berturut-turut menurut Pak Hasanuddin itu sangat cemerlang dan itu *hattrick*, Ibu. Dan sebagaimana saya sampaikan pada Kementerian-Kementerian mitra kerja kami, bahwa ada misalkan Kementerian Pertanian itu 2016, 17, 18 itu membuat *hattrick*, tetapi tidak diikuti dengan apresiasi dari sisi anggaran. Dimana Kementerian-Kementerian kita misalnya Pertanian, itu 2015 berikutan dengan perubahan, 32. Tetapi konon sampai dengan hari ini itu turunnya 20. Dari 32 dia turun, turun, turun sehingga tidak linear dengan apa yang dihasilkan.

Sama halnya juga dengan Kementerian KKP. 2015 13 Triliun, tapi hari ini itu sekitar 5 koma sekian. Jadi itu turun. Yang membuat Ibu berbeda dengan mitra kerja kami yang lain, Ibu punya predikat itu, dia linear dengan anggaran yang didapatkan, dimana setiap tahun itu selalu naik. Tahun ini pun waktu tahun kemarin 9,0 sekian Triliun ditahun ini, tetapi di tahun 2020 itu adalah 9,2. Dan walaupun anggaran ini dibuat oleh Ibu beserta jajaran, kami berdoa dan kami punya ikhtiar mudah-mudahan Ibu akan melanjutkan apa yang dibuat oleh Ibu beserta jajaran untuk diikutkan lagi dalam pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2019.

Kenapa demikian? Karena ini adalah prestasi yang linear baik dari sisi kinerja maupun dari sisi anggaran yang diapresiasi. Masuk barang itu ya Pak Salim ya? Itu kira-kira seperti itu. Tidak semua Kementerian punya hasil yang sama dengan Ibu, maka hari ini saya sepakat dengan Pak Hasanuddin bahwa marilah kita tepuk tangan yang meriah kepada Ibu beserta jajaran. Ini sesuatu yang sangat menarik.

Yang berikutan Ibu, dalam kaitan dengan pembahasan yang cukup panjang dengan masalah DAS. Saya melihat Ibu punya anggaran dalam rangka penanganan DAS. Saya mau tanya kira-kira bagaimana Ibu punya kerjasama hubungan dengan teman-teman di Kementerian PU khususnya Direktorat Sumber Daya Air? Karena disana Ibu, itu di tahun 2020, waktu saya terakhir keluar dari Komisi V itu tahun 2017 itu sudah 116 Triliun yang mereka punya anggaran. 2020 yang saya ikuti itu 117 Triliun, itu anggaran mereka. Ibu hanya 9 triliun, belum lagi di bagi ke Direktorat dimaksud. Apakah ini mencukupi?

Sementara teman-teman di Direktorat Sumber Daya Air itu anggarannya itu puluhan Triliun, bisa sampai sekitar 30, 40 Triliun hanya satu Direktorat yaitu Sumber Daya Air. Sehingga kalau tidak ada sinergitas yang positif antara Ibu dan teman-teman di Kementerian PU, dan saya punya ikhtiar bahwa Ibu punya hubungan baik dengan Pak Basuki. Dan kalau ini disinergikan, maka ini lebih efektif. Jujur Ibu, kemarin kita dari Kementerian Pertanian mengundang Dirjen daripada PU (suara tidak jelas) Direktorat SDA yang dikirim itu adalah Direktur. Susah sekali untuk membangun sinergitas dengan teman-teman di Kementerian PU. Karena apapun mereka sudah punya program sendiri. Tetapi apakah program yang ada pada mereka ya, minimal itu ada sinergitas dengan di Ibu. Ini mungkin juga, kami perlu apa namanya menempatkan hal dimaksud.

Lalu mungkin yang terakhir Ibu, dalam kaitan dengan masyarakat adat yang punya kayu dalam kaitan dengan kayu sitaan mungkin ada jalan keluar. Kita bisa dengar kira-kira kalau memang ada jalan keluar supaya mereka suka komunikasi dengan kami, tanya *progress* daripada Kementerian sampai sejauh mana? Karena katanya itu kayu masyarakat adat ini belum dibayar lunas, masih setengah. Katanya nanti dilelang baru mereka akan dapatkan pelunasan daripada kayu-kayu dimaksud.

Satu lagi Ibu dalam kaitan dengan Dapil. Kita tahu bahwa lima tahun yang lalu atau sepuluh tahun yang lalu itu ada yang namanya banjir bandang di Wasior. Wasior itu Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Wondama. Ada empat aliran sungai yang menyatu lalu membuat yang namanya banjir bandang itu sehingga kota Wasior sebagai Ibukota Kabupaten Teluk Wondama itu porak-poranda. Pada saat itu masanya Pak SBY sebagai Presiden. Dan beliau bersama kami waktu itu kesana, mungkin ini juga bagaimana penanganannya dan dalam kaitan itu dengan teman-teman Kementerian PU khususnya Direktorat Sumber Daya Air.

Mungkin itu beberapa hal Ibu yang kami sampaikan dan hari ini kami harus menyampaikan kepada Ibu bahwa sesuai dengan halaman 33 dibuku Ibu disini, itu capaiannya baru 27,88. 27,88 ekuivalen dengan 2,5 Triliun dari 9,0 sekian Triliun. Sementara waktu kita, ini waktu Ibu ini hanya sampai dengan bulan Oktober, tidak sampai dengan bulan Desember yang lazimnya terus ada adendum-adendum, perubahan-perubahan terhadap hal-hal yang belum dapat diselesaikan di tahun anggaran 2019. Ya kami semua Komisi IV punya harapan bahwa dengan prestatif yang Ibu raih, Ibu akan bersama-sama melanjutkan apa yang sudah diletakkan positif oleh Ibu hari ini. Betul Pak Hasanuddin? Pak Sulaeman? Ya Pak Sulaeman saya harus perlu tanya karena ini sesama apa namanya partai, karena ini luar biasa sekali walaupun Guburnya Ketua Demokrat, tapi Nasdem mendapat tiga kursi di Papua ini luar biasa sekali ya.

Jadi itu Ibu kira-kira itu apakah karena Ibu Menteri waktu itu hadir dengan Pak Surya Paloh kampanye apa namanya di Papua kali ya, Pak Sulaeman ya

waktu itu ya? Oke, jadi itu kira-kira Ibu, kami memberikan apresiasi. Semoga sebelum waktu bulan Oktober ini realisasi anggaran 9,0 sekian ini ada capaian yang bisa dibanggakan, sehingga Ibu akan mendapatkan *hattrick* yang tidak beda, kalau tidak analogi dalam sepak bola itu Ibu Menteri tidak banyak orang membuat *hattrick* dalam sebuah pertandingan. Jadi Ibu Menteri ini nanti kedepan beda-beda tipis dengan Ronaldo atau Messi ke depan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Menteri.

Sekian dan terima kasih.

Wabilahitaufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Roem.

WAKIL KETUA:

Terima kasih Pak Michael.

Tadi Pak Ketua Pimpinan tadi barusan ada lagu dari Pak Michael, Panggung sandiwara. Sebelum saya serahkan ke Pak Ketua, saya ingin menyampaikan lagu juga "*jangan ada dusta diantara kita*". Lebih cepat lebih baik. Sekarang giliran saya yang bicara boleh? Jadi saya serahkan kepada Pimpinan dan waktunya hanya sedikit-sedikit saja bicara, karena nanti diserahkan kepada Ibu Menteri.

Pertama saya ingin menyampaikan masalah pertama yaitu peningkatan atau pemanfaatan Taman Nasional, ini belum maksimal. Presiden kita waktu itu menyampaikan kepada semua pembantu-pembantunya untuk meningkatkan masalah ekspor, mendesak semua pihak untuk ekspor. Nah ini saya lihat dari aspek kehutanan ini belum tergali semua, padahal komoditi-komoditi ekspor yang berada di kehutanan ini sangat luar biasa dan itu berada di sebagian berada di Taman Nasional yang non kayu. Ini perlu ditingkatkan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak, seperti kita lihat sendiri banyak sekali bahkan banyak orang-orang dari China pun sudah masuk untuk menggali harta-harta karun kita yang berada di Taman Nasional.

Yang kedua masalah pengerusakan hutan mangrove. Itu dimana-mana, terutama kampung saya sendiri di Gorontalo, hampir ada beberapa lokasi daerah wilayah Gorontalo penghutanan mangrove itu berjalan ya. Sehingga bisa merusak dan juga mengancam apa namanya benih-benih ikan yang seharusnya kita pelihara.

Yang ketiga juga masalah hama, hama kera juga banyak sekali laporan masuk ke Komisi IV, sudah mengancam ya, mengancam petani ya, dimana-mana di Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di DKI Jakarta pun sudah ada, dan ini sudah memamakbiak sangat luarbiasa. Berkembang biak. Bayangkan saja

satu jantan dia bisa memainkan peranan sampai 40-50 betina perhari. Kita manusia diberikan apa namanya BKKBN ya Pak? Diberikan kondom, kalau kera tidak. Lama-lama dia memamahbiak betapa kita perkirakan berapa banyak nanti kera panjang itu akan mengancam Indonesia. Kalau dilakukan tindakan-tindakan ya pemusnahan dengan penembakan dimana-mana itu akan menjadi suatu masalah besar lagi bangsa kita. Ini perlu dicari solusinya sehingga bagaimana mengatasi masalah hama kera ini yang telah mengancam para petani.

Saya kira ini dari tiga, tiga persoalan yang ingin saya minta penjelasan dan sekaligus kita mintakan penjelasan kepada Ibu Menteri jawabannya tapi dengan catatan, sesuai dengan tata tertib, yang dijawab yang hadir saja, yang tidak hadir dijawab secara tertulis saja ya. Itu tata tertib sudah diatur tata tertib Bu. Saya persilakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih, yang terhormat Pimpinan.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Belum. Sebelum Bu Menteri.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan lagi?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Satu menit saja.

KETUA RAPAT:

Dua menit gapapa Pak.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Eenggak satu menit aja.

KETUA:

Oh iya, ya. dua menit aja Pak.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Iya dua menit.

Bu Menteri dan kawan-kawan di LHK. Di Aceh ada namanya tanaman Jernang, Jernang itu 250.000 per kilo. Pernah dibantu oleh Dinas disana, ditanam Jernang yang tumbuh Rotan. Saya ulangi, ditanam Jernang yang tumbuh Rotan. Artinya, bibit yang disalurkan kepada kaum petani bibit yang salah. Jadi, mereka berharap dapat Jernang tapi cuman Rotannya saja. Setelah

diteliti oleh kawan-kawan di Aceh, ini kebetulan ada orang Aceh disini, bibitnya yang salah, padahal Jernang itu 250.000 per kilo. Jauh lebih dari sawit dan yang lain-lain.

Oleh karena itu, kepada Dirjen Perhutanan Sosial, perlu dilihat di Aceh, betul gak Jernang itu harganya 250.000 per kilo, dan betul juga gak waktu itu diberikan bibit oleh Dinas Kehutanan Aceh, di Pidie sampai sekarang yang tumbuh cuma Rotan, Jernang nya gak ada. Ya mudah-mudahan ini bisa juga nanti ditanam di Sumatera Barat, karena di Sumatera Barat Rotannya juga banyak, Rotan banyak berarti Jernangnya juga banyak. Mungkin di Kalimantan juga nanti dan sebagainya, itu jauh lebih tinggi daripada Kayu Putih. Bukan saya tidak sepakat dengan Kayu Putih Bu Menteri, sepakat aja, tapi Jernang ini jauh lebih tinggi harganya dari Kayu Putih. Jernang ini 250.000 per kilo, itu jauh sekali bedanya dengan Karet dan Kelapa Sawit.

Terima kasih, itu saja Pak Ketua.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bener kan, dua menit kan kata saya.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Izin Ketua, ada yang tadi ada yang ketinggalan sedikit Ketua.

KETUA RAPAT:

Oy, silakan.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Siap. Ada yang tertinggal ini. Yang perlu saya tambahkan, seyogyanya selama ini kan sudah banyak ibu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, satu hal yang menurut saya kurang saat ini, perlu kita tingkatkan pemberdayaan masyarakat hutan Bu, yang Perhutani ngadunya sudah hilang, sekarang sudah itu kemarin juga sudah kami sampaikan kepada Perhutani. Dan sekarang lagi marak di masyarakat itu budaya kalau orang Bali bilang Klekle Bu, itu kandungan madunya saya liat di *google* juga bagus. Dan antusiasnya masyarakat untuk berternak dan meningkatkan kesejahteraan melalui budaya Klekle ini. Perlu sekiranya dari Kementerian Kehutanan mendapat perhatian, disamping untuk mengganti komoditi yang madu yang sudah dihasilkan Perhutani, nah ini perlu kita berikan sentuhan sehingga masyarakat kita bisa mengembangkan dan bisa meningkatkan kesejahterannya. Sekian Bu, Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Agung, memang kata Pak Roem Kono berkembangbiak dengan memamakbiak itu beda-beda tipis Pak.

Kami persilakan kepada Bu Menteri untuk menyampaikan, kalau sekiranya terlalu panjang dan detail kami mengusulkan kepada anggota untuk dalam bentuk tertulis lebih bagus begitu. Agar kami bisa baca secara lebih detail dan substantif. Nanti yang akan disampaikan ke Bu Menteri hal-hal pokok saja. Setuju ya?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A.S., M.Si.):

Sesuai dengan aturan, yang dijawab yang hadir saja sudah selesai, singkat aja yang hadir aja, yang gak hadir gak usah dijawab.

KETUA RAPAT:

Kalau yang gak hadir gak dijawab?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Ditulis saja.

KETUA RAPAT:

Ya semuanya lah ditulis.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Terima Kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Pimpinan.

Yang Kami Hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI.

Dan Yang Terhormat Ibu Dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

Saya mohon izin memang ingin menjawab secara *overview* hal-hal yang memang perlu kami respon sebab banyak catatan dari yang terhormat Anggota dan Pimpinan, hal-hal yang merupakan upaya-upaya untuk memperbaiki. Saya berterima kasih untuk temuan-temuan baru dan catatan-catatan yang baru dan saya ingin merespon beberapa hal.

Pertama terkait dengan kualitas udara. Saya mengikuti terus catatan-catatan atau koreksi Greenpeace Indonesia, tentang kualitas udara Kota Jakarta, dan itu sudah sejak dua tahun yang lalu dan memang disitu dikatakan

bahwa udara Jakarta jelek, ada uap batubara dan lain-lain dan saya ingin merespon disini bahwa sejak dua tahun lalu dengan peristiwa itu sampai termasuk yang satu dua minggu yang lalu, itu kami men-*check* ada persoalan metodologi, ada persoalan alat dan ada persoalan sampling. Jadi yang *study* Internasional itu saya liat samplingnya bukan di Indonesia. Jadi kita musti *check* juga, dan kami memang meminta Dirjen dan sudah dilakukan untuk berdiskusi dengan Greenpeace.

Yang sebenarnya menurut catatan Kementerian adalah bahwa dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 5 Juni 2019, itu rata-rata harian 28,7 angkanya. Dalam, dalam hal dengan baku mutu udara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri secara nasional yaitu angka 65. Tapi memang orang ada aktifis bilang harusnya ke angkanya WHO, WHO kan 25. Jadi kalau pakai angka 65 maka Jakarta sebenarnya udaranya tidak masalah. Kita punya titik-titik observasi di HI, kemudian di Jalan Merdeka dekat Kedutaan, kemudian ada di Pondok Labu, ada juga di Jakarta Timur, dan lain-lain. Terakhir kami pasang di Senayan karena ada Asian Games.

Memang kalau diminta *standard*-nya WHO, *standard*-nya WHO 28, jadi memang tidak sehat, bukan tidak sehat, karena dia kategorinya itu sehat, baik atau sehat, sedang, kurang sehat dan tidak sehat. Nah kalau pakai angka 25 PPM sedangkan angka kita 28,7 maka dia masuknya sebetulnya ke sedang, tetapi kalau sedang itu berarti untuk kelompok rentan, bayi atau manula itu akhirnya menjadi rentan menjadi kurang sehat. Jadi situasinya seperti itu yang keluhan Pak Budi. Nah hari ini dalam catatan alat kami PM 2,5 Jakarta itu diangka 74 jadi kurang sehat. Jadi situasinya seperti itu, kami sedang terus juga mengajak bicara kawan-kawan yang punya observasi itu, nanti beberapa perbaikan kualitas udara secara tertulis kami akan sampaikan.

Kemudian yang kedua tentang dana bergulir. Saya mohon izin melaporkan, terima kasih berbagai catatan ini, memang sejak 2007 akhir, Pemerintah sudah mengeluarkan PP 46 Tentang Instrumen Ekonomi. Dari Instrumen Ekonomi itu, sudah keluar Peraturan Presiden Nomor 46 juga, itu tentang Kelembagaannya, dan sekarang kami bersama Menteri Keuangan sedang menyiapkan kelembagaan BPD LH namanya. Biaya, eh Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Jadi itu nanti untuk seluruh dana lingkungan termasuk perubahan iklim juga ada disitu. Orientasinya untuk *small grain*, untuk investasi dan untuk *capacity building*. Jadi ada yang di masyarakat ada yang di aparat juga, tetapi juga boleh untuk investasi. Dan ini sesuai dengan saya kira catatan yang terhormat Pak Handoyo, kita bersama Menteri Keuangan menyipakan ini untuk badan yang profesional. Memang ada beberapa hambatan dan lain-lain, terus terang yang di BLU nya KLHK, itu kan sebetulnya karena dari dana reboasasi harus masuk ke APBN dan sebagainya. Jadi ada beberapa hambatan nanti secara tertulis kami akan laporkan. Iya.

Kemudian soal sampah, tadi yang terhormat Pak Hasanuddin menanyakan juga, yang lain-lain nanti secara tertulis, yang soal sampah sudah ada Peraturan Presiden Tentang Kebijakan Strategisnya bagaimana Perpres 97 ada juga Peraturan Presiden Nomor 8, 83 Tahun 2018 untuk penanganan sampah dilaut dan banyak juga inisiatif masyarakat yang sudah berkembang. Itu sudah kami *record*, dan kita secara internasional, juga nggak ketinggalan soal ini, dan sudah ada Peraturan Presiden juga untuk apa namanya sampah menjadi energi listrik. Sudah ada Pemerintah Daerah, Pemda nya yang ditetapkan yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Medan, Surabaya, Bali, Manado, Tangerang, Palembang, Solo, Bekasi, Denpasar. Jadi, jadi kita sudah, sudah melakukan beberapa hal ini.

Kemudian dalam kaitan dengan antara Komisi IV dan Komisi VII, ini memang mula-mula waktu apakah LHK ini di Komisi VII atau Komisi IV itu kan diskusinya di Dewan juga cukup serius, cukup panjang, akhirnya diputuskan di kedua-duanya. Memang di awal-awal itu masih *stick* kepada Komisi VII hanya *brown issues*, Komisi IV hanya *green issues*, tapi sekarang kelihatannya udah kecampur dan menurut saya tidak ada masalah. Jadi hanya memang sedang terjadi penyesuaian-penyesuaian. Kalau di, kalau paket program yang langsung kepada masyarakat dengan *bridging* Anggota misalnya, kalau di Komisi IV itu terkait dengan Bank Pesona, bibit dan sebagainya. Kalau di Komisi VII misalnya terkait dengan sampah dan lain-lain. Tapi kelihatannya sekarang ini lama-lama bisa saling apa *flowing* begitu ya bisa saling bersama. Nanti kita akan lihat perumusannya akan seperti apa. Jadi saya kira buat saya sih buat Pemerintah saya kira, makin banyak *bridging* dilakukan oleh yang terhormat Anggota kepada publik, *grash road* ya sebetulnya sih makin baik begitu. Jadi buat kita Kementerian tidak ada masalah.

Kemudian nanti soal pendangkalan DAM, normalisasi sungai dan sebagainya, kami akan jawab tertulis, tetapi pada prinsipnya itu ditanganinya oleh Direktorat Sungai, seperti tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Michael.

Kemudian tentang penanganan banjir dan pasca banjir pada dasarnya semua peristiwa itu diikuti dengan baik oleh KLHK, jadi kita merespons kemudian sekaligus menanganinya. Saya mau kasih contoh, misalnya yang di Papua, itu tindak lanjutnya RHL nya 1.500 hektar, DAM penahannya dibuat enam unit, instalasi apa namanya panen airnya 10 unit, itu kira-kira dananya 51 Miliar. Yang di Sulawesi Selatan, kurang lebih beberapa kegiatan RHL dan lain-lain itu dananya hampir 200 Miliar, jadi sebenarnya kita ikutin. Termasuk yang Aceh Tenggara, banjir Aceh Tenggara, banjir NTB, jadi banyak banjir-banjir tuh itu kita ikutin terus karena memang perintah Bapak Presiden penanganan rehabilitasi hutan dan lahan ini untuk artinya menyelamatkan masyarakat.

Tentang reklamasi dan IMB, saya kira saya lebih baik tertulis, karena disitu juga ininya panjang, banyak arahan-arahan Kementerian kepada Pemda DKI, tapi pada intinya IMB itu betul-betul sepenuhnya urusannya Pemda DKI. Tapi arahan-arahan dari Kementerian, sejak persoalan reklamasi ini diawal 2016, itu kita sudah berikan arahannya kepada Gubernur DKI.

Tentang pohon saya kira tadi muncul beberapa hal yang sifatnya kearifan lokal, apakah Jernang apakah Keratong dan lain-lain, sebetulnya sudah diatur, ada protokol Nagoya Internasional. Dan kita sudah atur dengan Peraturan Menteri, bahwa untuk hal-hal yang sifatnya lokal itu ada *benefit sharing*. Jadi kalau sesuatu khas lokal tertentu, dia dieksplorasi secara komersial maka sebetulnya menurut konvensi internasional, itu lokalnya dapat *sharing benefit* harusnya dan itu diatur dengan Menteri. Saya kira temuan-temuan ini semakin baik dan saya berterima kasih tadi berbagai catatan tentang hasil hutan bukan kayu, itu juga semakin berkembang.

Tentang kayu adat Papua yang terhormat Pak Michael, ini proses sidangnya sedang berjalan, saya nanti coba meminta Pak Dirjen untuk kita rembuknya harus seperti apa, karna konsepnya sih kalau sudah disita negara maka kayunya untuk negara kan gitu, nanti harus diartikulasikan lagi akan seperti apa apabila dikaitkan dengan adat dan sebagainya. Saya kira itu.

Tentang realisasi dana kita di 2019 ini kira-kira 30% di PEDASHL, dan 20% di KSDAE dan kalo liat realisasinya yang PEDASHL ini sudah 16, sudah hampir 17% dan ini karena masih proses pengadaan. Jadi saya kira biasanya di triwulan akhir triwulan dua dan di triwulan tiga serta awal triwulan empat itu intensif. Kita tetap memproyeksikan bahwa realisasi secara keseluruhan harusnya bisa diatas 95%.

Saya kira demikian Pimpinan yang kami hormati. Saya kira yang tertulis kita selesaikan, terima kasih.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit Pak Ketua, izin. Kalau diizinkan.

KETUA RAPAT:

Iya, izin, izin, di izinkan, diizinkan.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Bu Menteri saya mau jawaban masalah temuan tadi, gak usah ditutup-tutupi, memang kalau apa soalnya ketika kita balik nanti ke daerah, ini akan dipertanyakan, ini sudah heboh Bu. Di Aceh saya kira Ibu Menteri jawab termasuk janji Pak Dirjen tadi, kalau tidak ada memang katakan saja tidak ada Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kalau gitu interupsi (suara tidak menggunakan mic).

KETUA RAPAT:

Bagaimana Bu?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Pembangunan, iya sudah, sudah barusan sudah dilaporkan.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Masalah PLTM tadi Bu?

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Saya mengikuti, persoalan ini dari medsos. Terus terang saya agak rajin ngikutin medsos, Twitter dan lain-lain. Pada tanggal 9 Juni masuk medsosnya 10 Juni saya tanggal 9 Juni saya minta Pak Dirjen dan Pak Direktur ke lapangan. Saya dapat laporan lagi tanggal 11,12,13, tiap hari itu saya dilaporkan, tanggal 13 Juni dapat laporan, tanggal 16 Juni sudah dapat bahan, jadi di pengumpulan bahan keterangan jadi dilakukan penyelidikan. Sebetulnya Kapolres nya juga sudah apa mengambil langkah-langkah, KLHK sendiri akan melakukan pendalaman lagi. Barusan Pak Dirjen kasih tau saya. Karena tanggal 16 Juni itu baru berapa waktu yang lalu ,jadi saya baru dapat laporan lagi. Terima kasih Bapak.

KETUA RAPAT:

Sudah cukup semuanya? Kalau belum nanti kita ke kesimpulan.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Izin ketua. Sedikit Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, Pak Agung.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Jadi, Bu Menteri Yang Saya Hormati.

Terkait dengan yang saya sampaikan tadi terkait dengan normalisasi sungai, ini tidak seperti hal yang biasa, ini menyangkut ada tumbuhan bakau yang tumbuh di alur sungai itu. Saya mohon izin kalau ini ditebang oleh masyarakat ini kan bisa kena hukum dia. Nah sekarang saya mohon kebijakan

jalan tengah, ini ntar lagi hujan Bu, saya nggak mau masyarakat saya ntar kerendam air lagi. Itu tiga, tiga lingkungan yang kena, jadi mohon perhatian kepada Bu Menteri. Nah terkait dengan tadi madunya Trigona namanya baru saya inget, Trigona (suara tidak jelas) Trigona.

Sekian Bu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih.

Memang karakter *geomorfologis* kita itu sungainya suka pindah juga. Airnya tuh karena makanya dia sungai suka berliku-liku itu karna air suka pindah-pindah. Saya akan kirim tim ke lapangan Bapak, nanti karena kawasan lindung hutan lindung dan sebagainya ada otoritas Menteri, saya kira kita cari jalan keluarnya. Pada dasarnya, terkait dengan hutan sosial juga, mohon izin saya melanjutkan, Bapak Presiden sih sudah memerintahkan bahwa "*jangan lagi ada permasalahan terkait pemukiman dan masyarakat didalam hutan*" jadi pengertian pemukiman itu bisa perumahannya, *dwelling unit*, tapi bisa juga lahan garapan. Jadi pengaturan tentang itu artikulasinya sedang kami selesaikan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sudah cukup ya? Lagi Bapak?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A.S., M.Si.):

Ada lagi

KETUA RAPAT:

Iya silakan Pak, kalau untuk Pak Hasanuddin ok aja lah saya.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Ini untuk kita bersama.

Lapor Bu Menteri di Sumatera Barat juga ada PLTMH namanya, itu dialiran sungai Gumanti, Gunungnya yang di papas, dan saya koordinasi dengan Bupati, Bupati yang baru, karena izinnya diberikan oleh Bupati yang lama. Bupati yang baru merasa itu terganggu lingkungan, dan juga masyarakat disana, karena itu mengambil air dari sungai dan juga jalan yang menuju daerah itu rusak parah, sehingga perekonomian masyarakat disana terganggu. Mohon Ibu Menteri koordinasi dengan Bupati Kabupaten Solok, Pak H Gusman, dan mungkin Dinas Kehutanan yang ada di Provinsi, sama dengan kami nanti ikut survei kesana, untuk sama-sama kita lihat kejadian yang ada di lapangan

PLTMH aliran Gumanti Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Jadi saya ulang lagi PLTMH aliran Gumanti Alahan Panjang, Kabupaten Solok, yang mempergunakan air sungai dan memapas beberapa bukit yang ada disana dan itu mengganggu sekali perekonomian dilingkungan Alahan Panjang tersebut. Mudah-mudahan ini bisa kita survei bersama.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hasanudin.

Walaikumsalam.

Di ini, tidak usah dijawab Bu ya, nanti di jawab pakai itu apa tulisan, tertulis. Kalau sudah tidak ada marilah sama-sama kita membahas kesimpulan, keputusan rapat pada hari ini, mas tolong ditampilkan. Sudah? Wah ini, tadi gak di cek, gak di cek tadi. Kita tunggu sebentar, ada masalah soal teknologi. Sudah?

Kesimpulan, keputusan:

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018 dari BPK RI, selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperbesar serapan anggaran dengan meningkatkan kualitas kinerja, sehingga predikat WTP dapat dipertahankan. Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Mohon izin Ketua.

Serapan anggarannya mungkin ditambah 2019.

KETUA RAPAT:

Oh iya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Serapan anggaran 2019. Kalau mantan Sekjen DPD itu pasti titik koma nya ini aduh, ampun kita, teliti. Anggota? Setuju ya?

(KETUK PALU SATU KALI)

2. Komisi IV DPR RI menerima laporan atas tindak lanjut HAMSEM BPK Semester II Tahun 2018, dan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan keseluruhan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua, Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju. Anggota? Kalau diam berarti setuju.

(KETUK PALU SATU KALI)

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas realisasi APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019, sebesar Rp2.530.372.998.000,00 atau 27,88% dari Pagu APBN Tahun 2019 sebesar Rp9.076.472.000.682,00 dan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memprioritaskan penyelesaian program-program kerakyatan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Bu Menteri? Gak ada tambahan?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Setuju? Anggota?

(KETUK PALU SATU KALI)

Setuju ajalah ya Pak Salim ya? Biar cepat.

4. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan re-alokasi anggaran kepada APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 sebesar Rp247.600.000.000,00 (pengurangan anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung) sehingga Pagu APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 Per Eselon I adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp647.505.000.787,00
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp86.837.312.000,00
 - c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebesar Rp272.005.339.000,00
 - d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebesar Rp3.265.313.000.670,00
 - e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp1.620.053.025.000,00

- f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp493.725.000.576,00
- g. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp452.056.380.000,00
- h. Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp450.630.941.000,00
- i. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp346.068.857.000,00
- j. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya sebesar Rp285.782.534.000,00
- k. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan sebesar Rp544.294.191.000,00
- l. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi sebesar Rp293.854.125.000,00 dan
- m. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp318.340.945.000,00

Angka-angkanya sudah benar? *Copy, paste.* Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua, kami setuju.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Anggota? Silakan.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Ini, saya tadi sedikit belum dijelaskan secara anu ya, saya mohon penjelasan menyeluruh Bu, ini kaitannya kan sangat besar ya, apalagi ini dialokasikan ke belanja pegawai gitu ya? Nah, sedangkan kita selalu menyampaikan bahwa anggaran kita itu harus ke *public* gituloh. *Public*-nya itu apa? Ya rehabilitasi hutan. Masalahnya apa? Kalau enggak ya di silva kan saja. Wong ini larinya cuma hanya ke konsultan, Penger Planologi, Tes Tata Lingkungan ini kan? Ini harus filosofinya apa dulu nih? Gak bisa mengerjakan, gak bisa merehabilitasi hutan, serapannya anggaran kecil, atau apa? Ya kita harus minta penjelasan karena ini besar loh ini larinya ke *public* loh, bukan ke *public* loh ini. Rehabilitasi hutan dan lahan Program Pengendalian DAS. Ini sangat substansi sekali ini.

Coba dibaca ini, aku juga *uduuuh*, begitu baca ini usulannya re-alokasi anggaran kepada penambahan belanja pegawai, penambahan belanja pegawai, pegawai, pegawai, pegawai, dan pegawai. Karena ini belum, belum

paham betul, ya mohon ini dijelaskan lebih rigid ini, karena mohon izin. Ini adalah sangat substansi menurut saya. Karena arah anggaran itu yang pro-pur kepada *public*, bukan ke pegawai gitu. Mohon izin, mohon penjelasan lebih detail, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mas Rahmad, Bu Menteri bisa dijelaskan?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

Yang Terhormat Bapak Handoyo.

Saya mohon izin melaporkan bahwa pada tahun 2019, ada kelebihan sisa pengadaan. Jadi, jadi, ya sisa pengadaan jadi, jadi sebetulnya seluruh programnya sudah, itu sisa dari pengadaannya. Nah kemudian pada tahun ini juga keluar aturan-aturan dimana ada kenaikan tunjangan kinerja di aparat. Kenapa dia kesebar karena memang kan aparatnya tersebar menurut Direktorat Jenderal. Jadi, jadi kita pakai itu untuk mengisi kekurangan dari tunjangan-tunjangan kerja. Pegawai di pusat maupun di daerah. Jadi itu posisinya ya.

KETUA RAPAT:

Oke, Mas Rahmad? Saya rasa tidak ada masalah ini, biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Setuju ya?

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Njeh Bu Menteri. Njeh monggo.

KETUA RAPAT:

Ya oke ya, sudah.

(KETUK PALU SATU KALI)

Alhamdulillah Mas Rahmad setuju.

5. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif RAPBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKKL dan RPKL Tahun 2020 sebesar Rp9.219.231.000.497,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, kepala Bappenas dengan komposisi program per Eselon I sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Jenderal sebesar Rp592.759.666.000,00
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp86.966.609.000,00
 - c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebesar Rp300.399.790.000,00

- d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebesar Rp2.799.916.214.000,00
- e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp1.950.150.356.000,00
- f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp480.755.829.000,00
- g. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp458.679.200.000,00
- h. Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp468.790.771.000,00
- i. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp313.272.831.000,00
- j. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya sebesar Rp361.844.139.000,00
- k. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp370.467.798.000,00
- l. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi sebesar Rp393.833.246.000,00
- m. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp341.386.089.000,00
- n. Badan Restorasi Gambut sebesar Rp300.000.000.000,00

Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan pendalaman untuk membahas berdasarkan program dan kegiatan secara lebih detil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua. Oh, kurang titik yang di.

KETUA RAPAT:

Ada kesalahan angka?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Setuju, ya. Anggota?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Bukan tidak setuju, setuju saja.

KETUA RAPAT:

Tetapi?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN AS, M.Si.):

Tapi tolong, tolong terus, terus yang untuk DAS. Nah, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan hutan Lindung sebesar 2,7 Triliyun. Bu Menteri, ya karena terlalu banyak bencana-bencana yang menimpa daerah kita. Ini tidak terlepas dari pantauan dan kerja dari Direktorat Jenderal Pengendalian Sungai dan Hutan Lindung. Oleh karena itu, nanti kita tetap harus mendalami yang 2.7 ini kalau sekarang kan baru realisasi yang tahun kemarin 20, 28% ya. Nah, mudah-mudahan ini dengan pagu sebanyak ini, nanti kita akan mengawasi juga mudah-mudahanlah dengan pagu sebanyak ini, banjir dan lain sebagainya bisa teratasi. Ini saja Bu Menteri, supaya Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai ini betul-betul membuat program yang bisa membantu, meminimalisasi lah keadaan hutan dan banjir selama ini. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan.

KETUA RAPAT:

Ya, catatan penting dari Pak Hasanudin. Setuju ya Anggota?

(KETUK PALU SATU KALI)

6. Anggota Komisi IV DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran pada pagu RAPBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 sebesar Rp2.509.000.000.000,00 yang akan dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, program pengelolaan sampah, biaya pemeliharaan aset gedung kantor Manggala Wanabakti, dana dekonsentrasi dan atau tugas perbantuan kegiatan penguatan pendukung pendidikan vokasi, pengadaan sarana prasarana pemantauan kualitas lingkungan, dan penyelesaian target pemulihan lahan gambut melalui kegiatan restorasi gambut di tujuh provinsi. Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Saya minta maaf ada terminologi, kita biasanya bilang *dekontepe* tugas pembantuan bukan ap, pamban, m. Yang lain-lain terimakasih ketua.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Mohon izin Pak Ketua

KETUA RAPAT:

Ya ini soal ban, pembabuan, pembantuan. Ya, ya, ada lagi?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Ada lah.

KETUA RAPAT:

Ya, ya.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Bu Menteri kita nih, kalau bisa ditambah lah buk karena pemeliharaan aset gedung kantor Manggala ini kan tentu ga, do, a kantor ini kan sudah 30 tahun lebih ni Bu. Itu tidak layak lagi Bu, nanti kalau runtuh bahaya, karena sudah lebih dari 35 tahun kalau saya tidak salah. DPR biarin saja dulu lah, kita Kementerian saja dulu. Kalau bisa ditambah Bu, supaya gedung kantor Manggala Wanabakti ini di tahun ini sudah bisa diminta konsultan untuk membangun baru, bertahap lah, bertahap begitu. Ya Bu ya.

Yang kedua Bu, yang kedua. Ya, yang kedua polisi hutan kita ditambahlah gajinya supaya *illegal logging* yang ada di seluruh Indonesia bisa teratasi. Ya kalau satu Provinsi umpamanya ada polisi cuma lima atau sepuluh orang gimana dia mau ngawasi, nggak bisa. Tambah personelnya, tambah gajinya, berikan motor untuk dia pergi keliling hutan. Kalau memang perlu senjata, kasih senjata kalau perlu, supaya kawan-kawan yang kerjanya *illegal logging* ini bisa teratasi oleh mereka. Begitu juga dengan penegakkan hukumnya, harus kerjasama dengan pihak kepolisian kalau bisa tentara lah. Karena memang ada juga *backing-an* dari polisi dan tentara. Oleh karena itu ini perlu diselesaikan, kalau nggak banjir itu dimana-mana akan tetap ada. Kalau penegakkan hukumnya tidak diselesaikan secara tuntas. Siapapun *backing-nya* harus ditangkap, mau polisi, mau tentara, mau orang kehutanan sendiri, tangkap, hukum lebih berat dari pada yang me-*illegal logging*. Jadi sesuai dengan yang saya serahkan ke Ibu tadi. Itu kalau berhasil di undangkan, penegak hukumnya berlipat-lipat hukumannya daripada masyarakat yang memabat hutan.

Terimakasih Bu.

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Ini, tidak usah ditanggapi Bu, catatan aja Bu ya. Jadi setuju ya, Pak Hasanuddin ya?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Izin ketua.

Yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi TBL, BLU nya itu masuk dimana ya? Apa gak sebaiknya dimasukkan di kesimpulan nomor 6 ini?

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Menteri menanggapi.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kalau yang BLU itu, itu kelembagaan. Jadi karena di dimaksudnya adalah seluruh dana filantropi, luar negeri atau apapun yang bicara untuk lingkungan nanti masuknya ke Balai itu. Jadi bukan, bukan khusus di APBN.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Izin Ketua, menambah tadi. Jadi intinya barangkali yang beli sampean itu adalah yang soal BLU itu kan sangat dinanti.

KETUA RAPAT:

BLU?

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

BLU ya.

KETUA RAPAT:

Nanti ada poin sendiri dibawahnya.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Oke.

KETUA RAPAT:

Ya, ya, oke. Jadi setuju ya?

(KETUK PALU SATU KALI)

Saya sudah bisa baca soalnya ini. Enam, komisi IV DPR-RI menyetujui. Eh udah tadi, *sorry sorry*. Tujuh, ini karena belum makan siang.

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendalami dan mengkaji kembali usulan-usulan perubahan peruntukkan kawasan hutan dalam revisi RTRWP yang sudah masuk ke Komisi IV DPR-RI dan segera menyampaikan hasilnya kepada Komisi IV DPR RI.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, Pemerintah dulu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Setuju Pemerintah, Bu Menteri. Anggota?

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Pimpinan jadi, kalau soal dunia persilatan hari ini kan tidak ada soal masalah RTRWP ya. Ini semuanya kan bicara masalah APBN. Jadi saya kira, nggak perlu lah untuk dimasukkan kesini. Saya kira memang kalau memang Pemerintah itu sudah siap, bahkan dari saya pribadi untuk lebih hati-hati. Ini malah untuk menyegera-menyegerakan gitu loh. Saya kira nggak usah dimasukkan itu nanti.

KETUA RAPAT:

Dihapus saja?

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Dihapus.

KETUA RAPAT:

Dihapus Pak, Menteri? Ya? Setuju ya. Sudah dihapus saja, ya. Oke

7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memepbaiki dan menjaga kelestarian hutan. Terutama dari kegiatan perusakan hutan, dan perambahan kawasan hutan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengurangan pencemaran di tanah, air, dan udara.

Ya sebenarnya sudah jadi tugas dan tanggung jawab Kementerian sebenarnya ini. Perlu enggak poin ini masuk? Untuk penegasan saja sebenarnya, tapi untuk *stressing* perlu lah ya, gapapa ya, perlu ya. Ini bahasanya normatif Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terminologinya kalau di program itu namanya pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah.

KETUA RAPAT:

Pengendalian?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah.

KETUA RAPAT:

Ya. Anggota? Normatif ini ya. Setuju ya? Kalau diam berarti setuju.

(KETUK PALU SATU KALI)

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan atau budidaya serta peningkatan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti Minyak Kayu Putih, Madu, dan produk HHBK lainnya. Mengingat kebutuhan Minyak Kayu Putih dalam negeri yang besar sampai saat ini masih berasal dari produk impor.

Oh, sama kayak kayak RDP yang kemarin Bu ini Bu, dimasukkan di Raker sini. Hasil RDP yang kemarin kalau tidak salah. Atau kalimat bawahnya tidak usah ya, seperti minyak kayu putih, madu, dan produk HHBK lainnya titik gitu saja. Bisa juga disebutkan selain minyak kayu putih, madu, apalagi gitu. Kalajengking, tokek, di balai besar di Jawa Timur juga ada ini lho budidaya tokek juga loh.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Nambah satu, Jernang tadi Pak. Jernang.

KETUA RAPAT:

Jernang?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Jernang namanya. Buah, buah Rotan itu Jernang.

KETUA RAPAT:

Oh buah Rotan namanya Jernang.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Iya, itu 250.000 per kilo.

KETUA RAPAT:

Gapapa dimasukkin aja seluruhnya, biar nanti ada banyak keanekaragaman produk HHBK sesuai dengan kearifan lokal, ya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Izin Ketua.

Tadi tentang Kratom, itu sebetulnya Badan POM sudah meneliti. Sudah berkarbar dan karena ini terkait dengan BNN, dan lain-lain. Kami akan segera menindaklanjuti, mungkin KLHK jadi sangat kuat kalau, kalau ada dalam kurung misalnya antara lain Kratom, Jernang, dan lainnya.

KETUA RAPAT:

Jernang ya, bukan Jenang ya, jer Jernang, jer.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Karena kan ini tindak lanjutnya banyak.

KETUA RAPAT:

Oh iya, iya, oke.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Jernang.

KETUA RAPAT:

Kayu Putih, Madu, koma lagi Jernang, Krakom, Kratom, Jernang, Kratom, apalagi Bu? Getah, kemarin waktu RDP dengan Perhutani Litbang dan dan Perhutani, Gaharu juga sama ini Pohon Kemenyan juga. Pohon kemenyan itu saya baca di media 1 kilo 6,6 juta per kilo gitu. Cuma kalau ada getahnya itu pasti banyak hantunya, soalnya suka bau harum.

ANNGOTA RAPAT:

Berarti getah ini termasuk getah Pinus? Ya Bu ya?

KETUA RAPAT:

Iya, apa lagi? Getah Pinus? Getah Gaharu, Kemenyan, dan produk HHBK pokoknya yang lainnya lah ya, sudah cukup ya. Saya ulangi.

“Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan budidaya serta peningkatan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu HHBK, seperti Minyak Kayu Putih, Madu, Jernang, Kratom, Getah, Gaharu, Kemenyan, dan produk HHBK lainnya.”

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Mau tambah sedikit dulu, biar orang tahu. Jernang dalam kurung buah rotan, orang nggak tahu jernang apa.

KETUA RAPAT:

Iya nanti dikirain Jenang lagi, kalau Jenang itu Ya Jenang Kudus paling enak itu. Bahasa jawanya Jenang. Bu Menteri.

F-NasDem (Drs. FADHOLI):

Izin Pak Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Ibu.

F-NasDem (Drs. FADHOLI):

Pak Ketua, izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pemerintah dulu. Boleh kan? Ibu Menteri dulu, Pak Fadholi. Bu Men. Pak Fadholi, Bu Menteri dulu ya. Bu Menteri?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Setuju ya, oke.

Sekarang Pak Fadholi silakan, nah gitu Pak Fadholi.

F-NasDem (Drs. FADHOLI):

Istilah perhatian khusus itu sebetulnya kurang pas menurut saya. Karena lebih baik diganti mengoptimalkan saja. Jadi perhatian khususnya itu dihilangkan karena seakan-akan ada sesuatu dengan kata perhatian khusus itu. Jadi, "Menteri Kehutan dan kehutanan mengoptimalkan terhadap pengembangan dan yang lain" sehingga tidak ada, kalau perhatian khusus itu kan jadi kurang pas menurut saya.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Iya, ya, ya. Mengoptimalkan ya? Ya ini gapapa gitu. Saya rasa substansinya sama ya kan gitu. Ya, ya supaya lebih optimal lagi ya Pak Fadholi ya. Kembali lagi ke Pemerintah, gapapa Bu ya. Hanya susunan redaksinya. Pemerintah setuju, Anggota? Setuju ya?

(KETUK PALU SATU KALI)

Demikianlah, Bu Menteri.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ada lagi?

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Tadi yang respon dari Ketua cukup bijak, usulan dari Bli Golkar dan saya juga sudah merumuskan penambahan kesimpulan Ketua.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan lagi?

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Yang ke sembilan coba ditulis saya coba simak untuk "Komisi IV DPR RI, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengkaji penyempurnaan" sudah ditulis belum "untuk mengkaji penyempurnaan kelembagaan BLU, Lembaga Dana Bergulir, dan memberikan dukungan modal setiap tahunnya melalui pembiayaan APBN." Itu serta merta apa yang saya sampaikan ini adalah dalam rangka untuk mengoptimalkan apa yang sudah ada. Walaupun tidak bermaksud tidak optimal memang sudah bagus, tapi akan lebih sempurna bila menggunakan standar-standar atau BLU, walaupun tadi melakukan kajian-kajian. Tetapi kalau ada APBN di setiap tahun Kementerian Kelautan entah itu 10 Miliar, 20 Miliar, itu ditambah dari dukungan APBN melalui persetujuan parlemen. Demikian juga Kementerian Koperasi yang bertriliyun-triliyun itu paling nggak ada penambahan setiap tahun. Kalau ternyata tidak terserap banyak atau yang standart itu ya, nggak usah ditambahin. Tapi ketika banyak yang mengapresiasi dengan meminta bantuan dari Lembaga-Lembaga itu tentu Pemerintah mengapresiasi dengan penambahan APBN untuk diberikan ke rakyat,-rakyat.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, ini statusnya mengkaji saja Bu, mengkaji, ya kan gitu. Jadi ini kegiatan-kegiatan intelektual, gitu tapi penting sebagai sebuah konsepsi soal BLU. Silakan, Ibu. Ini mengkaji apa mengaji ya. Mengkaji bukan mengaji.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Melakukan kajian.

Ketua saya mohon izin. Mungkin dalam tahun ini juga atau dalam waktu singkat. Yang di Kementerian itu sudah bukan BLU lagi, tapi BLU yang sudah ada namanya berdasarkan Perpres yaitu apa namanya, Badan Pengelola, Badan BP, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. B nya b, semuanya huruf besar, BPD LH. Memang intinya adalah rintisannya adalah dari BLU nya Kehutanan yang dananya tempo hari diambil dari dana reboisasi. Dia akan dipakai untuk semua dana lingkungan, dana perubahan iklim nanti, dana karbon kalau orang mau *convert* karbon, misalnya kita punya prestasi karbon terus di dibayar oleh luar negeri misalnya. Itu juga masuknya kesitu.

KETUA RAPAT:

APBN boleh nggak, dana bergulir itu boleh nggak melalui dana APBN?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Penyertaan modalnya sih memungkinkan.

KETUA RAPAT:

Penyertaan modalnya, tapi ini kan dana bergulir?

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Izin Pimpinan.

Concern kami itu memang setuju Ibu, tetapi kalau alokasi dana 2 Triliun itu kemudian berubah bentuk menjadi penambahan perubahan iklim, hilang itu dana bergulir untuk UMKM. Rohnya disini adalah dana bergulir, kalau disitu untuk seminar, untuk apa, untuk perubahan iklim, penyempurnaan lingkungan hidup, saya nggak setuju. Meskipun *domain* untuk membentuk dana bergulir itu adalah SK Kementerian Keuangan. Tetapi roh yang kita bangun dari sini adalah bagaimana untuk membangun, menumbuhkan kewirausahaan. Karena itu adalah salah satu tupoksi yang diarahkan untuk diberikan kepada Kementerian Kehutanan dalam rangka untuk mendukung Prolegnas. Strategi Nasional yang salah satu Prioritas Nasional. Saya tidak setuju kalau dicampur Bu, jadi 2 Triliun itu akan sekian persen hanya untuk dana bergulir. Saya tidak setuju, kalau itu, makanya, makanya ini tetep harus disampaikan. Toh kalau, toh nanti ada BLU itu Kementerian Lingku, Kementerian Koperasi sebagai pembanding ada dua BLU.

Pertama, BLU pengembangan pemasar pe, memasarkan produk UKM itu BLU 1. Kedua, BLU khusus dana bergulir. Nah sah saja boleh saja pembentukan BLU itu tetapi tidak dengan menggunakan *men-take over* Kelembagaan dana bergulir. Saya tidak setuju sebagai wakil rakyat disini, karena rohnya dan tupoksinya beda sekali. Jadi kalau ternyata sekali lagi, ternyata membentuk BLU jangan menggunakan dana itu, biar nanti APBN murni Pusat dari Kementrian Keuangan memberikan, menginjeksi untuk pengelolaan dana BLU yang baru yang sesuai dengan itu. Kalau bergulir, BLU yang tadi disampaikan Ibu itu berbeda sekali dengan roh yang di bangun dari BLU yang dikembangkan atau yang sudah berjalan dari Kementrian Kuhatanan. Saya kira untuk itu saya tetap mendukung ini, dimasukkan nya, karena ini adalah meminta. Nah kemudian kalau sudah toh dibangun, BLU itu ya tupoksinya sudah berbeda sekali, begitu Ibu Menteri.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Saya usul, jalan tengah saja, karena tadi Ibu Menteri sudah ada Badan yang sudah ada Perpresnya Bu ya, sudah ada PP nya ya dimasukkan saja, BLU ini Sub Koordinat didalamnya, jadi BLU tetap ada didalamnya. Artinya apa yang telah diusulkan oleh Mas Rahmad tadi, bisa masuk didalam itu, jadi BLU ini tetap ada, jadi, jadi, menjadi Sub Koordinat sajalah, dari Badan yang sudah ada Perpresnya tadi. Intinya, Mas Rahmad dan kami berharap dana bergulir ini masih tetap ada, kan itu intinya. Intinya BLU ini masih ada, jadi dia dimasukkan saja kedalam Lembaga yang sudah ada Perpresnya tadi, ini jalan tengah saja, nah bahasanya disini, tolong Ibu Menteri dan kawan-kawan, apa bahasanya disini supaya yang nomor 9 tetap ada. Mas Rahmad juga terakomodir, Ibu juga bisa terakomodir, kami semua bisa menerima, ini jalan tengah saja Pak Ketua, Terima kasih Bu Menteri.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Ketua, ini berbeda Ketua. Karena rohnya kalau memang dana BLU tadi yang disampaikan eksplisit itu oleh Ibu Menteri, jalan aja enggak masalah. Tapi ini juga BLU nya juga jalan saja berbeda, beriringan jadi dua Lembaga BLU kalau perlu. Karena tugasnya berbeda, nggak bisa ditumpang tindihkan antara Lembaga Bergulir dengan Lingkungan itu hal yang berbeda, bertolak belakang. Apalagi dengan adanya isu-isu lingkungan masuk disitu sama sekali berbeda. Sehingga disini adalah substansinya sangat berbeda dengan apa yang disampaikan, tapi saya mendukung apa yang disampaikan Ibu, ada yang sudah ada Perpres itu, jalan saja nggak masalah, tapi ini juga tetep harus jalan, gitu. Jangan berdiri sendiri gitu, karena memang pembiayaan-pembiayaan itu kan tidak mungkin *bankable* masuk ya disinilah yang masuk gitu. Demikian Ibu Menteri saya tetap mengusulkan ini masuk,

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pengalaman, pengalaman di Perkebunan Bu Menteri, Undang-Undang Perkebunan Nomor 32 Tahun 2010 menyebutkan perlu ada Badan Khusus, kemudian berdasarkan SK Kementerian Keuangan membentuk Badan Pengelola Dana Sawit. Bagi pengusaha Sawit, bagi petani rakyat atau pengusaha nasional apabila melakukan ekspor untuk DPS diberikan pungutan dana Sawit sebesar 30 USD per ton, Untuk CPO 50 USD per ton.

Tetapi, nah tetapi alokasi pada waktu kami sebelum Rapat waktu itu ternyata 93% digunakan untuk membantu Biofull ada sekian pabrik, pabrik besar. Padahal menurut Undang-Undang Perkebunan itu adalah untuk *replanting*, untuk pengkajian, kemudian untuk pengembangan Sumber Daya Manusia dan kegiatan-kegiatan pengembangan Petani sawit, gitu. Kami panggil 2 orang pengelolanya semula *replanting*-nya hanya 3 %, sekarang *Alhamdulillah* menjadi 25 %. Nah harus hati-hati terhadap Badan Pengelola Lingkungan ini, jangan samapi kemudian juga mematikan BLU yang sudah bagus di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau kemudian nanti di lebur, perlu ada kajian khusus, karena BLU ini sangat dibutuhkan terutama buat petani, petani hutan gitu dan bisa dirasakan tentunya kalau kemudian isu ditarik ke atas melalui Perpres, tentu spektrumnya juga akan berbeda, tidak saja pada pengembangan usaha petani hutan, tapi spektrum yang lain. Nah jangan sampai kejadian Badan Pengelola Sawit itu terulang lagi, seperti itu. Nah sekarang Pemerintah, silakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

Saya mohon izin kalau gitu melaporkan bahwa, BLU ini kan sumbernya dari Dana Reboisasi, jadi spiritnya itu perbaikan sebetulnya. Tapi saya kira saya tidak masalah dengan kajian, kita kan lakukan kajian. Sekarang ini penempatan Dana BLU itu ada 2,015 Triliun, telah dilakukan akad sampai dengan bulan Mei kepada Petani bersama masyarakat itu, 2,053 Triliun. Jadi sudah ada dengan masyarakatnya malahan kita kekurangan 38 Miliar. Nah dari kesepakatan, 2,053 Triliun ini, sudah dilakukan secara bertahap sampai dengan 904 Miliar jadi sebetulnya ini nggak, nggak mengganggu yang urusan dengan masyarakatnya. Karena pada dasarnya Badan, Badan ini justru mencakup *Small Grand*, *Small Grand* itu artinya Dana Bergulir itu, dan Investasi termasuk juga *Capacity Building* untuk aktivis, untuk masyarakat, untuk petani melalui Kelompok dan sebagainya. Jadi sebetulnya *coverage*-nya sama Pak, Pak Handoyo, tapi nanti saya kita dengan kata kajian ini saya nggak masalah kita kan formulasikan aja yang terbaik.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Setuju Bu ya?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Agung.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Justru kalau saya sendiri, ingi men-*drop* kata kajian itu, justru langsung kepada untuk penyempurnaan Kelembagaan bukan Kajian lagi. Karena apa, karena yang Ibu Menteri, saya sangat setuju yang apa Ibu Menteri sampaikan, itu Lembaga yang berbeda, itu tetap harus dilakukan. Namun seperti yang Ketua sampaikan barusan, BLU yang langsung memberikan dampak kepada masyarakat ini yang sangat penting. Karena apa, karena pada posisi keuangan kita saat ini, kita perlu dan sangat penting membangun UMKM, dan sekarang di masyarakat marak sekali. Nah intinya BLU ini bukan hanya sebagai pemberi Dana Bergulir saja, saya menginginkan ada bentuk *real* pendampingan dari Pemerintah, terkait dengan pemberdayaan masyarakat hutan. Karena itu sangat penting sekali, sangat penting sekali, terkait dengan bagaimana kita budidaya Kayu Putih, Madu, Jenang. Kalau ini kita bisa membangun UMKM dengan BLU yang, yang sudah dilaksanakan oleh KKP, bagus sekali hasilnya. Pendampingan keuangan yang dilakukan oleh KKP, yang diberikan kepada masyarakat, itu dampaknya melalui Koperasi itu dampaknya luar biasa sekarang. Yang tadinya masyarakat tidak bisa berlayar, dia bisa berlayar, bahkan dia bisa menjadi suatu rumah kemas, terhadap budidaya kegiatan Perikanan itu sendiri.

Nah saya berkeinginan, BLU ini tetap ada, ini berjalan seiring seirama dengan yang programnya Bu Menteri. Yang mudah-mudahan harapannya saya, dan saya berkeyakinan kalau BLU yang berpihak kepada masyarakat ini, kaitanya penguatan UMKM, saya yakin kita akan bisa menumbuh kembangkan program-program, apa penyempurnaan dari kehutanan itu sendiri. Yaitu melahirkan kesejahteraan masyarakat yang lebih, dan juga melakukan pemberdayaan dan peningkatan dari komoditi kehutanan yang yang kita sudah hasilkan. Saya kira itu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Jadi kajiannya dihapus Ketua, langsung kepada penyempurnaan Kelembaga Layanan, Badan Layanan Umum.

KETUA RAPAT:

Saya mengerti pikirannya Mas Rahmad itu, kenapa perlu dikaji Mas Bagus. Biar memberikan waktu kepada KLHK untuk diskusi dengan seluruh *stake holder* terkait dengan BLU. Kalau sudah ada hasil kajiannya nanti kita ketemu lagi disini ya, bagaimana kita diskusikan untuk penyempurnaan itu. Tapi berilah waktu buat KLHK untuk mengkaji, ya. Ya, Mas Bagus ya. Intinya sama saja dengan kita.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Karena permintaan Pak Viva ya, saya terima. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya oke, begitu.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Anggota setuju ya?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Eenggak ada tambah sedikit, sedikit.

KETUA RAPAT:

Ada lagi Bapak?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Eenggak, ada tambahan saja.

KETUA RAPAT:

Tambahan ya.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Penyempurnaan Kelembagaan Badan Layanan Umum atau BLU dan Lembaga Dana Bergulir Lainnya. Kan ada dana tadi bergulir lainnya.

KETUA RAPAT:

BLU itu Lembaga Dana Bergulir. Sama.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Iya, bergulir, tapi kan.

KETUA RAPAT:

Lainya itu berarti lebih dari satu.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Iya, kan ada lagi tadi.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Cuma satu Ketua, Bang. Cuma satu Bang itu Bang.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A.S., M.Si.):

Iya BLU satu tapi kan ada Dana juga, Bergulir juga. Badan yang ada Perpresnya itu jangan ditinggal itu tetap. Ini tetap BLU ada yang ada Perpresnya juga ada. Nah bagaimana menulisnya disini, supaya yang Perpres itu tetap ada, gitu kan APBN juga.

KETUA RAPAT:

Ya, gimana Bu Menteri.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Bu Menteri, saya berharap yang ada Perpresnya dimasukan kesini, sehingga BLU berjalan sendiri secara profesional yang diharapkan Mas Rahmad kan itu. BLU ini tolonglah digarap, tolonglah dikerjakan secara professional, supaya BLU ini tepat sasaran. Tapi dana yang tadi Ibu sampaikan sudah ada Perpresnya, itu juga sangat penting. Karena itu Triliunan juga. Bagaimana bisa masuk disini, BLU tetap sendiri, karena tadi Mas Rahmad tidak mau digabung, tapi yang bergulir yang ada Perpresnya juga masuk disini. Nah bagaimana tulisan disini mohon dibantu kami.

KETUA RAPAT:

Bu Menteri, hasil Perpres Badan Pengelolaan Dana Lingkungan itu apa sudah ada strukturnya?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Itu perintahnya pertama dari Undang-Undang 32, kemudian ke PP 46, lalu ke Perpres 46 terus, Perpresnya baru memerintahkan membentuk BPD LH. Itu sudah ada namanya, sudah ada fungsi-fungsinya, kalau Kelembagaannya lagi disusun. Jadi penyempurnaan BLU bisa juga, kita enggak ada Lembaga Dana Bergulir lain selain BLU. Jadi BLU ini menyalurkan dana bergulir, jadi sebetulnya dia, apa terikat, *embedded*. Kalau mau, kalau boleh kelembagaan BLU dan kerangka BPD LH.

KETUA RAPAT:

Nah ya gitu ya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Dalam kerangka pembentukan BPD LH, saya akan kirimkan *positioning paper* kita yang awal sehingga kita.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Eenggak, Mas Toro beda itu Mas Toro.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Sehingga bisa didalami akan melangkah seperti apa, jadi jangan diputuskan sebab otoritasnya adanya pemerintahnya Kementerian Keuangan. Dia hanya minta *advice* kepada saya, gitu loh. Karena Badannya harus di Kementerian Keuangan, kan ngurusi uang.

KETUA RAPAT:

Atau begini, saya mengusulkan Lembaga Dana Bergulir itu dihapus saja, karena BLU itu substansinya adalah Lembaga Bergulir. Tugas pokok fungsinya gitu, BLU saja gitu. Karena ini domainnya adalah KLHK gitu dan tadi soal Perpres 46 Badan Lingkungan, Badan Pengelola Dana Lingkungan juga sampai sekarang juga masih belum selesai secara struktural segala macam. Jadi lebih fokus ke BLU saja Mas Rahmad kita penguatannya di Internal KLHK, jangan sampai hilang Badan ini, gitu loh.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Eenggak, maksud justru begini Ketua, saya memimpikan, BLU yang dibawah Kementerian KLHK ini dinaikkan ke BLU tingkat yang disetujui yang diperintahkan Kementerian Keuangan. Jadi tugasnya nanti dibawah dua supervisi, dibawah supervisi Kementerian Keuangan sebagai pemilik modal penanggung jawab keuangan negara dan penanggung substansi siapa-siapa yang akan mendapatkan pembiayaan itu dari Lingkungan Hidup ya yang daerah sekitar hutan itu gitu.

Jadi ini memang substansi nya tetap harus dimasukan dalam Lembaga Dana Bergulir Ketua. Dinaikkan nanti fungsinya dari Kementerian Keuangan sebagai fungsi pengawas, kemudian dibawahnya nanti ada fungsi manajemen sendiri. Sama dengan BLU yang akan diperintahkan dari Bank Negara berdasarkan Perpres Undang-Undang tadi itu, itu nanti Kementerian Lingkungan Hidup itu fungsinya ada dua. Sebagai pengawas, Kementerian Keuangan juga ada pengawas, nah manajerialnya juga berdiri sendiri. Jadi yang saya impikan itu ada dua BLU nantinya itu, kalau disinikan cuma BLU yang dibawah ansih

Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga pembiayaan pun terbatas, karena hanya kepemilikan Lingkungan Hidup, karena terbatas, mau nambahain sedikit.

Nah kalau dari BLU yang sudah ada, Kementerian Kelautan, Kementrian Koperasi itu disamping disisihkan dari APBN yang murni dari Kementerian masing-masing teknik terkait, juga ada dapat bantuan setiap tahunnya dari Kementerian, dari Kementerian Keuangan, gitu ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

BLU ini bukan dari APBN kan Bu ya. Tetapi dari Dana Reboisasi, nah Dana Reboisasi itu pakai 99 kalau tidak salah, itu BA 99, itu di Kementerian Keuangan.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Betul, betul, betul.

KETUA RAPAT:

Ini lepas dari APBN, gitu. Jadi substansinya sebenarnya sudah berjalan apa yang disampaikan oleh Mas Rahmad itu, sebenarnya itu. Coba Pak.

F-PD (Dr. MICHAEL WATTIMENA S.E., M.M.):

Saya tambahkan sedikit Pak Ketua, poin 9 ini dalam kaitan dengan BLU, pada saat Pak Rahmad mengusulkan ini secara spontanitas Ibu Menteri sudah mengatakan bahwa wajah ini sudah tidak lagi sama dengan wajahnya Pak Rahmad. Tapi sudah berganti wajah dengan Bu Michael Watimena, kira-kira gambarannya begitu. Dan kita mau paksakan pun ini sesuatu yang tidak *reasonable*, kenapa? Karena proses Perpres, PP nya ini sudah berubah dan ini bukan satu Perpres, Perpres yang keluar, tapi sudah beberapa yang dijelaskan, dikonstatir tadi oleh Ibu Menteri. Sehingga apa yang menjadi ideal dari pada Pak Rahmad melalui usulan poin 9 adalah idealisnya bahwa BLU ini jangan dihilangkan Bu Menteri. Karena realisasinya selama ini itu sangat membantu, lalu kalau bisa, porsinya juga, kalau misalnya Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup ini ada berbagai *item* bukan saja Ansh BLU, maka porsi BLU nya itu jangan didistorsikan, seperti itu.

Sehingga sepakat sebenarnya ini juga kan dalam proses kajian sebenarnya, karena Perpres itu dan Kelembagaannya itu kan masih dalam proses *on going*, seperti itu. Sehingga usulan dari pada Pak Rahmad ini supaya kita tidak bertele-tele dan berbelit-belit, roh dari pada BLU ini ada didalam yang namanya Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Porsinya juga jangan diciutkan Bu, kira-kira begitu. Walaupun wajahnya ini sudah berganti dengan Michael Watimena, tapi esensinya itu tidak hilang seperti itu, mungkin begitu Pak Viva. Kira-kira supaya kita jangan terlalu berbelit-belit sudah jam 3 kita juga

butuh energi, energi itu melalui makan dan minum, sehingga aktifitas kita bisa normal kembali. Ya Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke. Jadi jangan sampai terjebak kayak Badan Pangan Nasional Mas Rahmad, 2015 sampe sekarang juga belum terbentuk. Jadi itu akan membutuhkan kajian yang sangat, yang sangat komprehensif dan sangat lama saya rasa. Tapi intinya saya setuju dengan Mas Rahmad, dengan Mas Bagus, penguatan BLU dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada petani hutan.

F-PDIP (RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.):

Intinya saja Ketua. Jalan tengahnya Ketua. Ini kan kita memerintahkan, mohon maaf untuk mengkaji ya. Saya kembalikan lagi yang redaksional diawal, dan nanti sambil diskusi yang perdalam kita perdalam di kemudian pertemuan yang berikutnya saja. Saya nggak mau ke substansi yang lain. Tapi saya teman-teman Komisi IV memberikan PR kepada Kementerian untuk mengkaji Badan Layanan Umum (Lembaga Dana Bergulir) tetap ada. Nah itu saja jalan tengahnya, saya juga tidak akan memanjang lebarkan lagi. Terima kasih. Jadi ada Lembaga Dana Bergulir tadi.

Terima Kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi saya baca ya. “Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian penyempurnaan Kelembagaan Badan Layanan Umum/Lembaga Dana Bergulir”. Titik ya, nah oke, gitu aja Pak.

Nah gini mantap ini sudah. Saya rasa pengalaman di Badan Pangan Nasional, kemudian Dana Pengelolaan Sawit, itu merupakan pengalaman mahal Bu Menteri, jadi memang harus hati-hati. Karena apalagi ini Lingkungan Hidup, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Bu Menteri, setuju ya?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Anggota, setuju ya?

(KETUK PALU SATU KALI)

Alhamdulillah. Demikianlah Ibu Menteri, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, Para Anggota semuanya. Rapat yang sangat luar biasa telah kita selesaikan,

sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Ibu Menteri untuk memberikan beberapa hal kata penutup.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Yang Kami Hormati Pimpinan Dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Kami atas nama Pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, banyak hal yang sangat positif yang harus kami kerjakan, kami elaborasi dan banyak temuan-temuan dan catatan yang sangat berharga untuk ditindaklanjuti bagi kepentingan peningkatan kinerja Kementerian.

Sekali lagi terima kasih, mohon maaf untuk hal-hal yang kurang pas. Sekian.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih Bu Menteri yang sangat luar biasa. Semoga berjumpa pada gelombang dan periode yang kedepan bertemu kembali, Pak Fathuli senyum-senyum Bu soalnya.

Kepada para Anggota terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang telah kita putuskan bisa memberikan manfaat buat Rakyat, Bangsa dan Negara. Marilah sama-sama kita tutup.

Alhamdulillahirabilalamin.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

(KETUK PALU TIGA KALI)

Shalom.

Om Shanti Shanti Om.

Namo Buddhaya.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15:20)

Jakarta, 24 Juni 2019

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo

NIP. 196301221991031001

